



LKjIP 2024

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DEMAK



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sebagai instansi pemerintah wajib menyampaikan laporan atas pencapaian kinerja sebagai wujud asas akuntabilitas.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak merupakan bentuk komitmen nyata dinas dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN – RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak untuk meningkatkan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Demak atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati. Laporan ini juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, serta mendapatkan masukan dari *Stakeholder* terkait demi perbaikan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

1.2. Landasan Hukum

Berdasarkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung jawaban setiap Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, untuk itu dalam penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berpedoman berdasarkan dasar hukum antar lain sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Rencana Strategis berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2021;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak;
6. Indikatpr Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dalam Peratiran Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak
7. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024;
9. Indikatpr Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dalam Peratiran Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak;
10. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2024, sebagaimna telah diubah menjadi Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Perhubungan Kabuptan Demak Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaporan kinerja termasuk pengukuran atas rencana kinerja tahun 2024 tersebut, akan disajikan dalam buku ini.

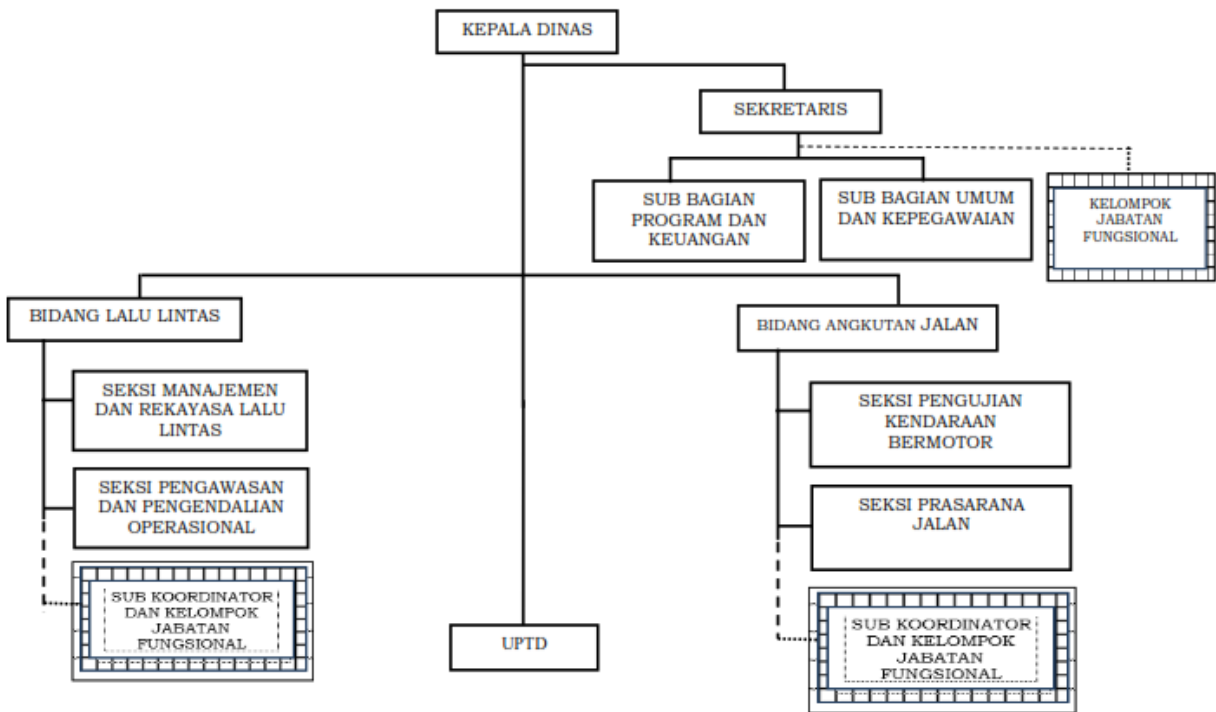
1.3. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Adapun tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Demak melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu. Dinas Perhubungan Kabupaten Demak merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Demak yang mempunyai tugas membantu tugas Bupati melaksanakan keweangan desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan dibidang perhubungan. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah selaras dengan paradigma

Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization), setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Visi Kepala Daerah “Demak Bermartabat Maju dan Sejahtera” dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Demak melakukan pemantapan dalam sistem transportasi dengan berorientasi pada konektivitas dan kepuasan pelayanan transportasi. Selain itu terdapat program kerja Kepala Daerah yaitu “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang agamis, Kondusif dan Berbudaya”.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam upaya pencapaian Kinerja pemantapan dalam sistem transportasi dengan berorientasikan konektivitas dan kepuasan



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

1.4. Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Adapun tugas dan pokok fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sesuai dengan penjabaran Peraturan Bupati Demak. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Perumusan kebijakan bidang perhubungan;
- 2. Pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;

4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Secara singkat Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mempunyai mandat yang harus dipertanggungjawabkan berkaitan dengan Pembangunan Bidang Perhubungan yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan perhubungan untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dalam pemerataan pembangunan;
2. Meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada ruas jalan yang tersebar di Kabupaten Demak;
3. Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan;
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Dinas Perhubungan yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Adapun tugas dan pokok fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, berkaitan dengan hal tersebut, uraian tugas antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggungjawab kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, kepala dinas perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan dinas, Sekretariat dalam menjalankan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;



- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas dengan susunan organisasi Sekretariat terdapat 2 (dua) Subbag Program dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas merupakan unsur pelaksana di bidang lalu lintas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas angkutan jalan, serta pengawasan dan pengendalian operasional. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan tugas Bidang Lalu Lintas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian operasional; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi bidang lalu lintas sesuai dengan fungsi diatas terdapat 2 (dua) seksi yaitu seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas, seksi pengawasan dan



pengendalian operasional serta bidang lalu lintas dibantu pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh sub koordinator.

4. Bidang Angkutan Jalan

Bidang Angkutan Jalan merupakan unsur pelaksana di Bidang Angkutan Jalan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Bidang Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan kegiatan angkutan, prasarana jalan, dan pengujian kendaraan bermotor. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan tugas Bidang Angkutan Jalan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana jalan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kendaraan bermotor; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Angkutan Jalan sesuai dengan fungsi diatas terdapat 2 (dua) seksi diantaranya Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Seksi Prasarana Jalan serta Bidang Angkutan Jalan dibantu Pejabat Fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Disamping itu, pada Bidang Angkutan terdapat 2 (dua) pelayanan yaitu Pengujian Kendaraan Bermotor dan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

5. UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan

UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan merupakan unsur pelaksana teknis Bidang Parkir dan Terminal, yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas. UPTD dipimpin oleh Ketua UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan serta terdapat 1 (satu) seksi, Subbag TU UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan. Berkaitan dengan pelayanan, pada UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan terdapat pelayanan berupa perizinan pendirian tempat parkir dan penyetoran PAD dari juru parkir.

1.5. Isu Strategis

Sebagai instansi pemerintah yang bertugas dibidang perhubungan, Dinas Perhubungan secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan Perumusan kebijakan bidang perhubungan, Pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, Pelaksanaan pembinaan administrasi dan

kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas. Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mempunyai tujuan yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” dan sasaran “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”.

Sehubungan dengan hal diatas, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak dinas mempunyai tujuan dan sasaran dengan penjabaran diantaranya sebagai berikut:

Tujuan:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Pelayanan jaringan transportasi.

Sasaran:

1. Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah;
2. Terwujudnya Pelayanan publik yang responsif;
3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak tentu saja sangat dipengaruhi beberapa tantangan yaitu ancaman dari fator eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Melihat hal tersebut, Dinas Perhubungan harus benar – benar mengoptimalkan semua peluang yang dimiliki yaitu kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Dinas Perhubungan. Dengan memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Dinas Perhubungan dapat membuat strategis yang tepat demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam menghadapi dinamika yang terjadi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1.
Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

Aspek	Peluang	Tantangan
Regulasi	- Terwujudnya <i>Zero Over Dimensi dan Over Loading</i> - Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas - Pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Dukungan bersama stakeholder terkait	- Masih ditemukan banyak kendaraan wajib uji yang masih belum melaksanakan pengujian kendaraan bermotor - Perlunya dilakukan penindakan terhadap <i>Over Dimensi dan Over Loading</i> bersama stakeholder terkait - Terbatas - Menumbuhkan minat masyarakat terkait dengan angkutan umum - Meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat mengingat Kabupaten Demak

Aspek	Peluang	Tantangan
		banyak pabrik yang mana mayoritas pekerja menggunakan Sepeda Motor - Pelaksanaan Forum Lalu Lintas guna mensinkronisasi bersama stakeholder terkait guna melaksanakan Manajemen rekayasa lalu lintas dan perencanaan lainnya
Kelembagaan	Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sebagai dinas teknis Penyelenggaraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Perhubungan), hal ini tentunya memberikan peluang bagi Dinas Perhubungan untuk menyusun perencanaan bidang perhubungan yang mengutamakan keselamatan bertransportasi.	Masih banyak terdapat kegiatan dokumen perencanaan bidang perhubungan masih masih belum ideal dan lengkap, untuk itu diperlukan beberapa dokumen pendukung pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan guna menuju berkeselamatan transportasi
Sumber Daya Manusia	- Peningkatan kompetensi bidang perhubungan - Peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai dengan beban kerja - Perubahan budayan kerja dengan memanfaatkan teknologi untuk efektif dan efisiensi penyelesaian tugas - Kekosongan struktur organisasi dinas	- Pelaksanaan peningkatan kompetensi bidang perhubungan - Penyesuaian kelas jabatan - Menyesuaikan perubahan budaya kerja dengan pemanfaatan teknologi - Pengusulan kekosongan struktur organisasi kepada dinas terkait
Lingkungan Strategis	Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan mempunyai hubungan baik dan berkolaborasi dengan stakeholter terkait terutama yang bersinggungan langsung dengan transportasi/ perhubungan.	Terdapat dinamika pembangunan sektor perhubungan yang cukup tinggi dan berimplementasi terhadap penyesuaian dokumen penataan ruang dan perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2021 -2026

Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran akan sulit tercapai. Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganannya karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang.

Oleh karena itu penentuan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu-isu strategis yang tepat dan bersifat strategis yaitu meningkatkan akseptabilitas prioritas

pembangunan, dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis untuk menentukan isu-isu strategis yang telah dilakukan, diperoleh rumusan isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Dokumen teknis sebagai acuan dalam pengembangan jaringan transportasi
Penyusunan dokumen teknis disusun sesuai dengan proses dan tahapan perencanaan dan pengembangan jaringan transportasi, namun belum sepenuhnya sesuai. Hal ini disebabkan adanya pertumbuhan transportasi dimana setiap tahunnya kendaraan bermotor semakin bertambah sehingga diperlukan adanya dokumen kajian ruas jalan terhadap layanan kinerja lalu lintas.
Berkaitan dengan hal tersebut, perlunya dilakukan beberapa metode guna mendapatkan layanan kinerja lalu lintas yaitu survey volume lalu lintas, hambatan samping, dan kapasitas ruas jalan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas dokumen dimana ada beberapa rencana pengendalian diantaranya:
 - a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), khususnya yang berkaitan dengan bidang perhubungan yang mengetahui pelayanan kinerja lalu lintas;
 - b. Melaksanakan survey volume lalu lintas dengan pengaturan waktu tertentu guna mengetahui puncak arus kendaraan yang digunakan sebagai bahan untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. Keterbatasan alat survey sehingga menghambat dalam pelaksanaan survey;
 - d. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh pihak terkait untuk melaksanakan pelaporan/ pemaparan layanan ruas jalan.
2. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana LLAJ dalam menjamin keselamatan, kelancaran keamanan, kenyamanan bagi pengguna transportasi dan mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas
Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) merupakan isu strategis yang mempengaruhi keselamatan, kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pengguna transportasi serta dapat meningkatkan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas. Berikut adalah penjelasan mengenai isu strategis terkait kurangnya fasilitas ini:
 - a. Keselamatan lalu lintas
Masih terdapat beberapa ruas jalan dengan keterbatasan perlengkapan jalan yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Perlengkapan jalan yang dimaksud adalah marka jalan, rambu lalu lintas, guardrail, deliniator, Zona Selamat Sekolah dan perlengkapan jalan lain sesuai dengan kriteria ruas jalan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, isu strategis perlu adanya



pemenuhan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan berupa perlengkapan jalan.

b. Kelancaran lalu lintas

Perkembangan transportasi sangat pesat dimana jumlah kendaraan setiap tahunnya semakin meningkat sehingga dapat menyebabkan kemacetan, berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan beberapa tahapan untuk mencapai kelancaran lalu lintas dengan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas terkait dengan ketersediaan lahan parkir, pembagian jalur/ lajur sesuai dengan jenis kendaraan serta pengaturan sistem lalu lintas berupa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Sehubungan dengan hal tersebut isu strategisnya adalah perencanaan dan pengembangan infrastruktur dan keterbatasan fasilitas penunjang dalam kelancaran berlalu lintas.

c. Keamanan dan kenyamanan pengguna transportasi

Keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas dan jalan yang belum tersedia perlengkapan jalan meningkatkan risiko tindak kejahatan dan kecelakaan. Untuk itu dalam isu strategis adalah memperkuat pengawasan berkaitan dengan keamanan lalu lintas dan implementasi teknologi modern untuk meningkatkan keamanan seperti pemasangan CCTV Jalan di beberapa titik ruas jalan.

Kurangnya penyediaan fasilitas sarana dan prasarana LLAJ menghadapi berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian menyeluruh. Solusi strategis melibatkan peningkatan infrastruktur, standarisasi fasilitas keselamatan, pengembangan sistem manajemen lalu lintas, dan peningkatan keamanan dan kenyamanan pengguna transportasi. Kolaborasi antara stakeholder terkait dan masyarakat sangat penting untuk memastikan, merumuskan dan menerapkan solusi yang efektif guna menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, nyaman, lancar dan berkeselamatan.

3. Rendahnya disiplin dan tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas

Rendahnya disiplin dan tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas merupakan isu yang signifikan dan dapat mempengaruhi keselamatan, kelancaran dan keamanan berlalu lintas. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai tantangan dan isu strategis:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia berkaitan dengan keselamatan lalu lintas;
- b. Sosialisasi dan kampanye lalu lintas di sekolah dan masyarakat yang mengajarkan lalu lintas dan keselamatan masih kurang;
- c. Budaya lalu lintas dengan kebiasaan masyarakat yang tidak mendukung kepatuhan terhadap aturan lalu lintas;



d. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur.

Menangani rendahnya disiplin dan tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini termasuk penguatan sosialisasi, kampanye, pengembangan budaya keselamatan, peningkatan fasilitas dan infrastruktur. Kolaborasi antar Perangkat Daerah dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan patuh.

4. Belum optimalnya penanganan parkir di Kabupaten Demak;

Penanganan parkir di Kabupaten Demak secara teknis belum optimal sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan, penurunan kualitas layanan dan dampak negatif terhadap perekonomian lokal. Sehubungan dengan hal tersebut ada penjelasan mengenai isu strategis terkait penanganan parkir:

a. Keterbatasan Ruang Parkir

Jumlah fasilitas parkir yang tidak memadai dibandingkan dengan volume kendaraan yang terus meningkat. Ini menyebabkan kendaraan sering parkir sembarangan, yang dapat menambah kemacetan dan mengganggu arus lalu lintas dan kendaraan yang diparkir di tepi jalan, trotoar, atau area yang tidak diperuntukkan bagi parkir, menyebabkan gangguan dan mengurangi kenyamanan pengguna jalan lainnya.

b. Manajemen Parkir yang tidak efektif

Tidak adanya sistem manajemen parkir yang efektif, seperti sistem pemantauan dan penegakan hukum yang memadai untuk mengatur penggunaan tempat parkir dan penegakan aturan parkir yang lemah atau tidak konsisten, seperti kurangnya pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran parkir.

c. Keterbatasan Fasilitas Parkir

Fasilitas parkir yang ada tidak memenuhi standar kenyamanan dan keamanan bagi pengguna, seperti kurangnya penerangan, aksesibilitas, dan fasilitas tambahan seperti tempat duduk atau sanitasi dan Keterbatasan fasilitas parkir di area komersial atau pusat kegiatan, yang mengakibatkan pengunjung atau pembeli kesulitan dalam menemukan tempat parkir.

d. Dampak kemacetan dan kualitas lalu lintas

Parkir yang tidak teratur dapat menyebabkan kemacetan, terutama di daerah padat yang tidak memiliki fasilitas parkir yang memadai dan kendaraan yang parkir sembarangan atau ditempay yang tidak sesuai dapat mengganggu arus lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Sehubungan dengan adanya hal diatas perlu adanya langkah strategis yang bisa diambil diantaranya perencanaan parkir yang komprehensif, implementasi



teknologi, peningkatan penegakan hukum, pembangunan infrastruktur serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perparkiran. Hal tersebut diharapkan parkir di Kabupaten Demak dapat menjadi lebih optimal, mengurangi kemacetan, meningkatkan kenyamanan, dan mendukung kelancaran lalu lintas secara menyeluruh.

5. Belum optimalnya kualitas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor
Pengotimalan kualitas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor belum optimal sehingga dapat mempengaruhi keselamatan jalan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi sistem transportasi secara menyeluruh. Berikut adalah beberapa permasalahan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor:

- a. Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas

Kurangnya fasilitas pelayanan berupa peralatan pengujian kendaraan bermotor yang sudah berumur sehingga dalam pelaksanaannya sering mengalami kerusakan yang dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam pemeriksaan kendaraan dan diperlukan modernisasi dan standarisasi serta fasilitas ruang tunggu kurang memadai, dan jalur akses masuk pada musim hujan banjir.

- b. Kualitas dan Kompetensi SDM

Tenaga Teknis Penguji Kendaraan Bermotor masih ditingkatkan rendah sehingga diperlukan adanya peningkatan tingkat guna meningkatkan skill pengujian kendaraan.

Sehubungan dengan hal diatas, diperlukan untuk peningkatan kualitas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan memodernisasi fasilitas dan teknologi, peningkatan kapasitas uji, pelatihan dan pengembangan SDM penguji berkala kendaraan bermotor dan pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

6. Belum optimalnya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten;
Pengotimalan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) di jalan sementara ini belum bisa dikatakan optimal sehingga dapat menimbulkan risiko signifikan terhadap keselamatan pengguna jalan dan mengurangi efektivitas sistem manajemen lalu lintas. Berikut adalah penjelasan berkaitan belum optimalnya audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Kurangnya personel yang terlatih dan fasilitas untuk melaksanakan audit dan inspeksi secara menyeluruh dan rutin dan Keterbatasan dalam peralatan dan teknologi untuk melakukan inspeksi yang efektif, seperti perangkat untuk memantau kondisi jalan dan keselamatan infrastruktur.

- b. Kesadaran pentingnya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan



Guna meningkatkan efektivitas audit dan inspeksi keselamatan LLAJ ada beberapa langkah diantaranya pengembangan kapasitas dan infrastruktur, implementasi sistem informasi, standarisasi prosedur dan praktik dan pelaksanaan edukasi berkaitan dengan audit dan inspeksi keselamatan. Berkaitan dengan langkah tersebut, kualitas dan efektivitas audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dapat ditingkatkan.

7. Belum adanya rancangan konektivitas dan integrasi bidang lalu lintas angkutan jalan yang akan mendukung efisiensi mobilitas transportasi pada Kabupaten Demak:

Rancangan konektivitas dan integritas dalam bidang lalu lintas angkutan jalan belum tersedia sehingga dapat menghambat efisiensi mobilitas transportasi dan mempengaruhi kualitas pelayanan transportasi di daerah tersebut. Konektivitas dan integrasi yang efektif penting untuk mengoptimalkan sistem transportasi, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan. Berikut adalah beberapa permasalahan pelaksanaan rancangan konektivitas:

- a. Kurangnya perencanaan terpadu
Perencanaan transportasi yang dilakukan secara terpisah tanpa mempertimbangkan integrasi antara berbagai moda transportasi dan rute jalan dan Kurangnya data dan analisis yang komprehensif mengenai pola perjalanan dan kebutuhan transportasi di seluruh Kabupaten.
- b. Infrastruktur yang tidak terhubung
- c. Fasilitas transportasi seperti terminal, stasiun, dan tempat parkir yang tidak terhubung secara baik, mengakibatkan efisiensi mobilitas yang rendah dan Jalur transportasi yang tidak terkoordinasi dengan baik, mengakibatkan perjalanan yang kurang efisien dan peningkatan kemacetan.
- d. Kurangnya sistem informasi dan teknologi
- e. Kurangnya sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau dan mengelola lalu lintas secara efisien dan Penggunaan teknologi yang terbatas untuk pengelolaan dan pemantauan transportasi yang dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas sistem.
- f. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat
- g. Masyarakat yang kurang menyadari pentingnya konektivitas dan integrasi dalam sistem transportasi dan Partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan dan pengembangan sistem transportasi yang terbatas.

Mengatasi dan meningkatkan konektivitas serta integrasi dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai langkah diantaranya pengembangan rencana transportasi terpadu, pembangunan dan perbaikan infrastruktur,



koordinasi antar stakeholder, pengembangan sistem informasi dan teknologi, dan edukasi dan partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam pelaksanaan konektivitas dan integrasi dalam sistem transportasi di Kabupaten Demak dapat ditingkatkan serta mendukung efisiensi mobilitas, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi bagi masyarakat.

Berkaitan point – point diatas, Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Perhubungan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Perhubungan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Perhubungan.

Kebijakan Pemerintah diambil sebagai arah dalam menentukan program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal maupun eksternal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program- program pembangunan yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Program BRT Trans Jateng adalah program pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memenuhi pelayanan masyarakat dibidang transportasi massal terutama untuk konektivitas wilayah Kedungsepur koridor 3 yaitu jalur Semarang-Demak.

Kebijakan pemerintah untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pengembangan kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kabupaten Demak akan melaksanakan perluasan kawasan perkotaan di Kabupaten Demak yang diharapkan kawasan perkotaan yang aman, nyaman, indah dan berkesinambungan.

1.6. Keadaan Pegawai

1.6.1. Dukungan Sumber Daya Manusia

Guna melaksanakan urusan administrasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak didukung oleh sumber daya manusia sebagai mana tercantum pada table dibawah ini:

Tabel 1.2.
SDM Menurut Golongan

NO	UNIT / BIDANG	GOL I			GOL II			GOL III			GOL IV			JUMLAH ORANG		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	-	1	-	1	1	4	5	1	-	1	3	4	7
3	Bidang Angkutan Jalan	-	-	-	1	2	3	2	3	5	-	-	-	3	5	8
4	Bidang Lalu Lintas	-	-	-	6	-	6	4	-	4	2	-	2	11	-	11
5	UPTD Sarpras	-	-	-	4	-	4	1	-	1	-	-	-	5	-	5
	Jumlah	-	-	-	12	2	14	8	7	15	4	-	4	19	9	33

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Tabel 1.3.
SDM Menurut Eselon

NO	ESELON	JUMLAH		
		L	P	Jumlah
1	Eselon II b	1	-	1
2	Eselon IIIa	1	-	1
3	Eselon IIIb	1	-	1
4	Eselon IV a	2	-	2
5	Eslon IV b	1	1	2
	Jumlah	6	1	7

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Tabel 1.4.
SDM ASN Menurut Pendidikan Formal

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	5	-	5
2	Sarjana S1	3	6	9
3	Sarjana Muda (D2 dan D3)	1	4	5
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	13	1	14
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	-	-
6	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-
	Jumlah	22	11	33

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Tabel 1.5.
SDM Menurut Pangkat/ Golongan

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Pend	Pangkat Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional / umum
1	ARIEF SUDARYANTO, S.Sos, M.Si NIP. 19700518 199001 1 001	Kepala Dinas Perhubungan	S-2	IV/c	V	
2	SUGIHARTO, SP, M.Si NIP. 19691122 199603 1 002	Sekretaris & Plt. Kabid Angkutan	S-2	IV/b	V	
3	Drs.MUHAMAD AKHOLIQ, M.Si. NIP. 19690708 199101 1 002	Kabid Lalu Lintas	S-2	IV/a	V	



No.	Nama dan NIP	Jabatan	Pend	Pangkat Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional / umum
4	SUNOTO, SE, M.Si NIP. 19740607 199803 1 004	Kasi Wasdalops & Plt. Kasi manajemen Rekayasa Lalu Lintas	S-2	IV/a	V	
5	KHAMDAN, S.Sos NIP. 19670908 199803 1 005	Analisis Kebijakan Ahli Muda & Sebagai Sub Koordinator Keselamatan LLAJ	S-I	III/d		V
6	PURBO JATMIKO, S.Kom.,MM NIP. 19790909 201212 1 001	Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor	S-2	III/c	V	
7	SOLEKUL HADI, S.Sos. NIP. 19690301 199103 1 004	Plt. Kepala UPTD Sarpas Perhubungan & Kasubag TU UPTD Sarpras Perhubungan	S-I	III/d	V	
8	RUDY SARWONO NIP. 19700412 199203 1 003	Pengemudi	SMA	III/b		V
9	SRI UTAMI, S.H NIP. 19760201 200701 2 008	Pelaksana Pengawas dan Pembinaan Angkutan Pada Sub Koordinator Angkutan	S-I	III/b		V
10	EKO ALFIANTO NIP. 19781109 199803 1 004	Pelaksana Administrasi Umum Pada seksi Wasdalops	STM	III/b		V
11	EDY RIWOTO NIP. 19771128 199603 1 001	Pengadministrasi Umum	SMA	III/b		V
12	HERLINA OLIVIA EKANINGDIAH, S.Tra NIP. 19870706 200903 2 003	Kasubbag UMPEG & Pelaksana Pengelola Data Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	S-I	III/b	V	
13	AYU HESTININGTYAS A.P, S.Tra NIP. 19880820 201101 2 002	Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor	S-1	III/b		V
14	HANIK TRI PRIHATININGSIH NIP. 19731101 200701 2 009	Pelaksana Pengelola Keuangan Pada Subbag Keuangan	SMEA	III/a		V
15	YULIA BUDI ANGGRAENI, S.T. NIP. 19870719 200903 2 003	Penyusun Rencana Pengujian pada Seksi PKB	S-1	III/a		V



No.	Nama dan NIP	Jabatan	Pend	Pangkat Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional / umum
16	MARLINA YUGA PRAMESTI, S.ST NIP. 19950816 202012 2 020	Pelaksana Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pada Subbag Program Keuangan	S-I	III/a		V
17	KUSNADI NIP. 19690522 200701 1 007	Pelaksana Pengadministrasi Umum Pada UPTD Sarpas Perhubungan	SLTA	II/d		V
18	SUGITO NIP. 19660904 2007101 1 009	Pengemudi Crane Pada Sub Koordinator Keselamatan LLAJ	SLTA	II/b		V
19	SUNARDI NIP. 19690922 200701 1 004	Pengemudi Crane Pada Sub Koordinator Keselamatan LLAJ	SLTA	II/c		V
20	IMRON MASHUDI NIP. 19701019 201212 1 001	Pelaksana Pengadministrasi PKB Pada Seksi PKB	SMA	II/c		V
21	MUHAMMAD ARIFIN NIP. 19720612 200701 1 022	Pengemudi Crane Pada Sub Koordinator Keselamatan LLAJ	SLTA	II/b		V
22	R. PRASETYO DWI A.P. NIP. 19840327 201212 1 003	Pelaksana Tehnisi Survey Lalulintas Jalan Pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas	SMA	II/c		V
23	SUBANDI NIP. 19680405 200701 1 027	Pengemudi Crane Pada Sub Koordinator Keselamatan LLAJ	SLTA	II/a		V
24	ROFII NIP. 19720525 201212 1 001	Juru Pungut Retribusi	SMA	II/c		V
25	SUKIJO NIP. 19720525 201212 1 001	Juru Pungut Retribusi	SMA	II/c		V
26	SUENDRO NIP. 19740314 200701 1 006	Juru Pungut Retribusi	SMK	II/d		V
27	AKHMAD MAJID, A. Md. NIPPPK. 19890405 202321 1 031	Pranata Komputer Terampil	D-III	VII		V
28	DIAH PUSPITANINGRUM, A.Md. PKB NIPPPK. 19940504 202321 2 039	Penguji Kendaraan Bermotor	D-III	VII		V
29	DIAN DWI LESTARI, A.Md. PKB NIPPPK. 19980326 202321 2 014	Penguji Kendaraan Bermotor	D-III	VII		V
30	REZANI NURMANINGTYAS, S.T NIPPPK. 19930320 202421 2 024	Pranta Komputer Terampil	S1	IX		V

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Pend	Pangkat Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional / umum
31	SAMSUL HIDAYAT, S.Kom NIPPPK. 19940510 202421 1 018	Pranta Komputer Terampil	S1	IX		V
32	MARTA LISTIANAH, A.Ma. NIPPPK. 19910304 202421 2 031	Penguji Kendaraan Bermotor	D - II	VI		V
33	RAHAYU LASIASARI JAYANI, A.ma.PKB NIPPPK. 19970531 202421 2 024	Penguji Kendaraan Bermotor	D – II	VI		V
Jumlah					7	26
Jumlah Total					33	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Tabel 1.6.
SDM Non ASN Menurut Pendidikan Formal

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
2	Sarjana S1	5	3	8
3	Diploma IV	2	1	3
4	Diploma III	2	1	3
5	Diploma II	-	-	-
6	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	24	6	30
7	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	2	-	2
8	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-
	Jumlah	40	13	46

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Tabel 1.7.
SDM Tenaga Teknis (Pegawai Tidak Tetap) Menurut Pendidikan

NO	NAMA	TINGKAT PENDIDIKAN
1	AHMAD SHOLEH, S.Pd	S.1
2	AINUL LATIFAH, S.Ak	S.1
3	NOR FAIZAH, SH	S.1
4	HANY FA'IZIN, S.ST	D-IV
5	RIZKI MAULIA FATAH, S.ST	D-IV
6	BAEHAQI HASBIYANSYAH, S.ST	D-IV
7	IVONNY AYU RAHMAWATI, A.Md. LLAJ	D-III
8	HERI SUSANTO, A.Md	D-III
9	BENNY KINTOKO	SLTA / Sederajat
10	NUR ASIYATUL AMNA	SLTA / Sederajat
11	SUHADI	SLTA / Sederajat
12	DWIYANTO	SLTA / Sederajat
13	SUNARYO	SLTA / Sederajat
14	DAVID INDRIASMAN	S1
15	DISKI ARIZAL	SLTA / Sederajat
16	EKA SATRIYA PERDANA	SLTA / Sederajat

NO	NAMA	TINGKAT PENDIDIKAN
17	BAYU HERLAMBAANG	SLTA / Sederajat
18	M. ALFIAN QORRY IFADA	S1
19	SYARIFAH SAUDAH	SLTA / Sederajat
20	RIAN GALIH SAMODRO	SLTA / Sederajat
21	GALANG HERU VIRGIAWAN	SLTA / Sederajat
22	ARIATUN	SLTA / Sederajat
23	SENO PRASETYO ADI WIBOWO	S1
24	BAGUS ISMARYANTO	SLTA / Sederajat
25	HADI IRAWAN	SLTA / Sederajat
26	HARSONO	SLTA / Sederajat
27	MUHAMMAD ARIF HIDAYAT	SLTA / Sederajat
28	MUHAMMAD YULIANTO	SLTA / Sederajat
29	M. EKO JUARSO	S1
30	ACHMAD FARIQ ZAINUL CHAQ	SLTA / Sederajat
31	DJAKA CIPUTRA LAKSANA	SLTA / Sederajat
32	AGUNG DWI SUSANTO	SLTA / Sederajat
33	GATOT RAGIL SAPUTRO	SLTA / Sederajat
34	IMAM SUJONO	SLTP / Sederajat
35	SAIKUN	SLTP / Sederajat
36	ADI KUSVIANTO	SLTA / Sederajat
37	WINDY CAKTI WIRATAMA	SLTA / Sederajat
38	DINDA AYU LESTARI	SLTA / Sederajat
39	MOH ALFIN KURNIA FAHRI	SLTA / Sederajat
40	MOH. ARDIANSYAH NIKO SAPUTRO	SLTA / Sederajat
41	ARYA AJI SIDDHIQ	SLTA / Sederajat
42	SA'DATUL LAILIYAH	S1
43	ANGGITA KUSUMASTUTI	SLTA / Sederajat
44	RINA IMAS SURYANTI	SLTA / Sederajat
45	AHMAD FAUZI ADI SAPUTRA , A.md.PKB	D-III
46	MOHAMMAD SAIFUL YUSUF	SLTA / Sederajat

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Tabel 1.8.
SDM ASN dan Non ASN Menurut Bidang Transportasi

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1	S1/ D-IV Transportasi	2	3	5
2	D-III Transportasi	-	1	1
3	D-III Pengujian Kendaraan Bermotor	1	2	3
4	D-II Pengujian Kendaraan Bermotor	-	2	2
	Jumlah	3	8	11

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

1.7. Sarana dan Prasarana

Kebutuhan ruangan kantor umumnya sudah tersedia meliputi ruangan kerja, ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang gedung, ruang tunggu dan

toilet. Adapun perlengkapan kantor yang berupa meja, kursi, lemari filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain lainnya dalam kondisi baik. Berkaitan dengan hal tersebut, ketersediaan sarana dan prasarana yang terletak pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sudah cukup memadai, hanya saja beberapa diperlukan penghapusan dan peremajaan guna mendukung kelancaran, kemudahan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak untuk melaksanakan pelayanan yang prima bidang perhubungan. Berikut ini rekapitulasi daftar inventarisasi barang sampai dengan tahun 2024:

Tabel 1.9.
Daftar Inventarisasi Barang Tahun 2024

NO	GOL.	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	TANAH	2	2.205.188.000	
2	2		PERALATAN DAN MESIN	1.062	20.599.702.374,00	
		1	ALAT BESAR	-	-	
		2	ALAT ANGKUTAN	39	7.010.670.614	
		3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	21	3.306.289.000	
		4	ALAT PERTANIAN	5	21.610.500	
		5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	528	1.945.521.450	
		6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN	58	356.983.500	
		7	PEMANCAR	-	-	
			ALAT KEDOKTERAN DAN			
			KESEHATAN			
		8	ALAT LABORATORIUM	-	-	
		9	ALAT PERSENJATAAN	-	-	
		10	KOMPUTER	171	1.409.707.834	
		11	ALAT EKSPLORASI	-	-	
		12	ALAT PENGEBORAN	-	-	
		13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN	-	-	
			PEMURNIAN			
		14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	
		15	ALAT KESELAMATAN KERJA	3	20.000.000	
		16	ALAT PERAGA	-	-	
		17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	
		18	RAMBU - RAMBU	237	6.528.919.476	
		19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	
3	3		GEDUNG DAN BAGUNAN	60	5.475.955.234,34	
		1	BANGUNAN GEDUNG	21	4.518.356.452	
		2	MONUMEN	-	-	
		3	BANGUNAN MENARA	36	712.557.064	
		4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	3	245.041.718	
4	4		JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN	620	23.890.130.202,00	
		1	A. JALAN DAN JEMBATAN	1	526.729.600	
		2	B. BANGUNAN AIR/IRIGASI	7	233.172.400	
		3	C. INSTALASI	12	1.366.266.999	
		4	D. JARINGAN	600	21.763.961.203	
5	5		ASET TETAP LAINNYA	319	79.079.000,00	
		1	BAHAN PERPUSTAKAAN	318	76.659.000	
		2	BARANG BERCORAK	1	2.420.000	
			KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA			
		3	HEWAN			
		4	BIOTA PERAIRAN	-	-	
		5	TANAMAN	-	-	
		6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	
		7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	

NO	GOL.	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA	KET
1	2	3	4	5	6	7
6	6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	
			TOTAL	2.063,00	52.250.054.810,34	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui Dinas Perhubungan mempunyai beberapa inventarisasi barang tahun 2024 yang memiliki jumlah Rp. 52.250.054.810,34 dari tahun sebelumnya berjumlah Rp. 49.885.123.310,34 atau naik 4,74%. Kenaikan tersebut diakibatkan adanya beberapa pengadaan barang dan jasa seperti pengadaan perlengkapan jalan dan penambahan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai penunjang pelayanan bidang perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemanfaatan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dimana salah satunya adalah dalam pelaksanaan pemeliharaan lampu penerangan jalan dengan menggunakan kendaraan operasional berupa *Crane* yang mana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah (BMD) Kendaraan Operasional *Crane* Pemeliharaan Penerangan Jalan

1.7.1. Anggaran Tahun 2024

Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2024 yang digunakan sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas sebagai mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.10.
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perhubungan
Tahun 2024

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening			Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
				Sebelum	Sesudah	(Rp.)	%
4			PENDAPATAN DAERAH				
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.081.026.800	3.216.875.000	1.135.848.200	54,58
4	1	02	Retribusi Daerah	2.081.026.800	3.216.875.000	1.135.848.200	54,58
Jumlah Pendapatan				2.081.026.800	3.216.875.000	1.135.848.200	54,58
5			BELANJA DAERAH				
5	1		BELANJA OPERASI	31.221.428.306	31.054.290.400	(167.137.906)	0,53
5	1	01	Belanja Pegawai	4.653.372.506	3.873.534.600	(779.837.906)	16,75
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.568.055.800	27.180.755.800	612.700.000	2,30
5	2		BELANJA MODAL	1.564.000.000	2.001.300.000	437.300.000	27,96
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.564.000.000	2.001.300.000	437.300.000	27,96
Jumlah Belanja				32.785.428.306	33.055.590.400	270.162.094	0,82
Total Surplus / (Defisit)				(30.704.401.506)	(29.838.715.400)	865.686.106	2,81

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak berasal dari APBD Kabupaten Demak. Merujuk tabel diatas, terdapat perubahan anggaran yang semula Rp. 32.785.428.306,00 berubah menjadi Rp. 33.055.590.400,00 atau bertambah Rp. 270.162.094,00 (0,82%). Berkaitan dengan penambahan anggaran Biaya Operasional (BOP) Juru Parkir dan Program Prioritas berupa Pemasangan LPJU di Ruas Jalan Gempolsongo – Karanganyar.

1.8. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini disajikan mencakup penjelasan Umum Organisasi (Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas, Isu Strategis), Keadaan Sumber daya (Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana dan Prasarana, Keuangan) dan Sistematika LKjIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang ringkasan/ Ikhisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

2.1.1. Visi, Misi dan Program Kerja

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Demak serta mempertimbangkan budaya hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Demak sampai akhir periode.

Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Demak menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Demak baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Demak untuk periode 2021-2026 “Demak Bermartabat Maju dan Sejahtera”.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak melakukan penerapan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan sehingga memudahkan mobilitas orang/ barang dengan aman, nyaman dan berkeselamatan serta meningkatkan pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat misi Bupati Demak antara lain:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya;
2. Meningkatkan sumber daya manusia, sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi local, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam rangka mewujudkan pembangunan bidang perhubungan dengan menjalankan program kerja Kepala Daerah Ke-7 “Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Terutama Dikawasan Pesisir, Pertanian, dan Pusat Pertumbuhan/ Pusat Produksi”.

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal – hal yang diperlukan dilakukan untuk mencapai sebuah Visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Demak dalam jangka kurang waktu

5 (lima) tahunan. Adapun tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan; dan
2. Meningkatkan pelayanan jaringan transportasi.

Dalam rangka pencapaian tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi guna mencapai tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya capaian sasaran strategis kinerja Perangkat Daerah;
2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif; dan
3. Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas.

Sehubungan itu, berikut ini adalah target capaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Demak:

Tabel. 2.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

N o.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	78,96	78,98	79,00	95,50	80,00	80,00
		Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap perangkat daerah	Nilai yang diperoleh dari hasil kinerja sasaran dibagi jumlah indikator sasaran	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan pelayanan jaringan transportasi		Total dari nilai persepsi oerunsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang	88,20	89,30	91,60	93,20	95,90	95,90
		Terwujudnya pelayanan pablik yang responsif	Jumlah pengaduan dibagi jumlah penanganan pengaduan	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas	Jumlah perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan	0,38	0,41	0,41	0,45	0,48	0,50

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2022 – 2026

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategis merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Misi dan Program Kerja Kepala Daerah Kabupaten Demak tahun 2022 – 2026 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Misi dan program kerja tersebut maka dirumuskan strategis 5 (lima) tahun mendatang. Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategis kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategis agar lebih spesifik/ fokus, konkrit dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu

mengarah pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Adapun Strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

Visi : Demak Bermartabat Maju dan Sejahtera			
Misi : 1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya.			
Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian Sasaran strategis tiap Perangkat Daerah	SDM bidang Perhubungan yang terampil	Peningkatan SDM Bidang Perhubungan
Meningkatkan Pelayanan Jaringan Transportasi	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Integrasi E-Government	Pengadaan dan Pengembangan GIS (Geografis Informasi System)
	Meningkatnya Kinerja pelayanan Lalu Lintas		Pengembangan/ Pemeliharaan Aplikasi Si Pantas Aksi
			Pengadaan dan Pemeliharaan PJU Pintas
			Pengembangan/ Pemeliharaan Aplikasi Si Kaji
			Pengembangan/ Pemeliharaan Aplikasi Sispela
			Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas
			Pengadaan dan Pemasangan APILL (Traffic Light/ Warning Light)
			Pengadaan dan Pemasangan LPJU
			Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan
			Pengadaan dan Pemasangan CCTV Lalu Jalan
			Pemeliharaan CCTV di Jalan Persimpangan Jalan

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2022 – 2026

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Perencanaan kinerja menjabarkan dari tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam target perubahan renstra:

Tabel 2.3.
Tujuan/ Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program, Kegiatan dan SubKegiatan		
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	I	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program, Kegiatan dan SubKegiatan	
		Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap perangkat daerah	Nilai yang diperoleh dari hasil kinerja sasaran dibagi jumlah indikator sasaran	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				a	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2	Meningkatkan pelayanan jaringan transportasi		Total dari nilai persepsi perunsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang		
		Terwujudnya pelayanan pablik yang responsif	Jumlah pengaduan dibagi jumlah penanganan pengaduan	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
				a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				e	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program, Kegiatan dan SubKegiatan	
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
				c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				a	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				b	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
				2	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
				a	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				3	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				a	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
				b	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				c	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
				a	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
				b	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
				5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
				a	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
				6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
				a	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Program, Kegiatan dan SubKegiatan	
				b	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
				7	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				a	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				b	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas	Jumlah perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan	II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
				a	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2022 – 2026

Mengutip tabel diatas, secara lengkap diuraikan sesuai dengan program dan kegiatan urusan perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan (suboutput)	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Penanggungjawab	
			Target Capaian Tahun Anggaran 2024		Target Capaian Tahun Anggaran 2024			
			Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			32.785.428.306		33.055.590.400	Dinas Perhubungan	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan	91,60	Persen	29.409.128.306	91,60	Persen	Dinas Perhubungan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	4,00	Dokumen	20.000.000	4,00	Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,00	Dokumen	20.000.000	4,00	Dokumen	Subbag Program dan Keuangan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	2,00	Laporan	6.334.028.306	2,00	Laporan	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28,00	Orang/ Bulan	4.607.572.506	28,00	Orang/ Bulan	Subbag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00	Dokumen	1.726.455.800	12,00	Dokumen	Subbag Umum dan Kepegawaian
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100,00	Persen	2.000.000	100,00	Persen	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	78,00	Paket	Subbag Umum dan Kepegawaian

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan (suboutput)	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Penanggungjawab		
			Target Capaian Tahun Anggaran 2024		Target Capaian Tahun Anggaran 2024				
			Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1,00	Orang	2.000.000	1,00	Orang	1.110.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100,00	Persen	194.000.000	100,00	Persen	241.141.841	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	Paket	10.000.000	1,00	Paket	10.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	Paket	80.000.000	1,00	Paket	71.564.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1,00	Paket	15.000.000	1,00	Paket	17.137.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	Paket	20.000.000	1,00	Paket	20.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,00	Laporan	10.000.000	1,00	Laporan	20.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	Laporan	59.000.000	12,00	Laporan	102.440.841	Subbag Umum dan Kepegawaian
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	2,00	Unit	14.000.000	2,00	Unit	35.300.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2,00	Unit	14.000.000	2,00	Unit	35.300.000	Subbag Umum dan Kepegawaian

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan (suboutput)	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Penanggungjawab		
			Target Capaian Tahun Anggaran 2024		Target Capaian Tahun Anggaran 2024				
			Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8		
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100,00	Persen	22.655.100.000	100,00	Persen	21.981.969.159	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,00	Laporan	1.500.000	2,00	Laporan	3.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Laporan	22.653.600.000	12,00	Laporan	21.978.469.159	Subbag Umum dan Kepegawaian
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	6,00	Unit	190.000.000	6,00	Unit	275.894.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4,00	Unit	90.000.000	4,00	Unit	165.894.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2,00	Unit	60.000.000	2,00	Unit	70.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4,00	Unit	15.000.000	4,00	Unit	15.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00	Unit	25.000.000	2,00	Unit	25.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	100,00	Persen	3.376.300.000	100,00	Persen	3.929.000.000	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan (suboutput)	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Penanggungjawab		
			Target Capaian Tahun Anggaran 2024		Target Capaian Tahun Anggaran 2024				
			Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen pengelolaan jaringan transportasi dan Lalu Lintas Jalan tersedia .	1,00	Dokumen	10.000.000	1,00	Dokumen	10.000.000	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1,00	Dokumen	10.000.000	1,00	Dokumen	10.000.000	Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase sarana perlengkapan dalam kondisi baik	100,00	Persen	2.278.262.000	100,00	Persen	2.773.262.000	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10,00	Unit	2.178.262.000	10,00	Unit	2.683.262.000	Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2,00	Unit	100.000.000	2,00	Unit	90.000.000	Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan izin dan fasilitas parkir terlaksana.	4,00	Dokumen	50.000.000	4,00	Dokumen	50.000.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1,00	Dokumen	50.000.000	1,00	Dokumen	50.000.000	UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase uji KIR angkutan umum	100,00	Persen	170.000.000	100,00	Persen	170.000.000	

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan (suboutput)	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Penanggungjawab		
			Target Capaian Tahun Anggaran 2024		Target Capaian Tahun Anggaran 2024				
			Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1,00	Unit	30.000.000	1,00	Unit	20.000.000	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.600,00	Dokumen	40.000.000	1.600,00	Dokumen	40.000.000	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11,00	Unit	100.000.000	11,00	Unit	110.000.000	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas terlaksana	2,00	Laporan	460.000.000	2,00	Laporan	510.000.000	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4,00	Laporan	110.000.000	4,00	Laporan	160.000.000	Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Subbag Umum dan Kepegawaian
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	4,00	Dokumen	350.000.000	4,00	Dokumen	350.000.000	Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
6	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah andalalin tersedia	2,00	Laporan	5.000.000	2,00	Laporan	5.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2,00	Laporan	5.000.000	2,00	Laporan	5.000.000	Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan (suboutput)	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Penanggungjawab		
			Target Capaian Tahun Anggaran 2024		Target Capaian Tahun Anggaran 2024				
			Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8		
7	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan tersedia	2,00	Laporan	343.038.000	2,00	Laporan	343.038.000	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	2,00	Laporan	75.000.000	2,00	Laporan	75.000.000	Seksi Pengawasan Pengendalian Operasional
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12,00	Laporan	268.038.000	12,00	Laporan	268.038.000	Seksi Pengawasan Pengendalian Operasional
8	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya jaringan trayek angkutan perkotaan	2,00	Dokumen	60.000.000	2,00	Dokumen	67.700.000	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,00	Dokumen	35.000.000	1,00	Dokumen	42.700.000	Seksi Angkutan
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,00	Dokumen	25.000.000	1,00	Dokumen	25.000.000	Seksi Angkutan

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

2.4. Rencana Kerja Tahunan

Penjabaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Demak sebagaimana berisikan perencanaan yang global dengan penjelasan hanya sampai pada program. Oleh karenanya diperlukan perencanaan yang bersifat detail yaitu penjabaran kegiatan. Perencanaan yang lebih detail disebut dengan Rencana Kerja.

Adapun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Tujuan				
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	Angka	79,00
Sasaran				
1.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap perangkat daerah	Nilai yang diperoleh dari hasil kinerja sasaran dibagi jumlah indikator sasaran	%	100
Tujuan				
2	Meningkatkan pelayanan jaringan transportasi	Total dari nilai persepsi perunsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang	%	91,60
Sasaran				
2.1	Terwujudnya pelayanan publik yang responsive	Jumlah pengaduan dibagi jumlah penanganan pengaduan	%	100
2.2	Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas	Jumlah perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan	Angka	0,45

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan kabupaten Demak, 2022 – 2026

Mendasar pada hasil evaluasi triwulan II Tahun 2024, maka dilakukan penyesuaian kembali rencana kerja tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Perubahan target rencana kerja tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Tujuan				
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	Angka	79,00
Sasaran				
1.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap perangkat daerah	Nilai yang diperoleh dari hasil kinerja sasaran dibagi jumlah indikator sasaran	%	100
Tujuan				

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
2	Meningkatkan pelayanan jaringan transportasi	Total dari nilai persepsi perunsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang	%	91,60
Sasaran				
2.1	Terwujudnya pelayanan publik yang responsive	Jumlah pengaduan dibagi jumlah penanganan pengaduan	%	100
2.2	Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas	Jumlah perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan	Angka	0,41

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Berdasarkan tabel 2.5. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024 dan tabel 2.6 Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2024 diketahui adanya perubahan target kinerja dimana terletak pada Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dimana sebelum dilakukan perubahan mempunyai target angka 0,45 dan pada perubahan diubah menjadi angka 0,41. Sehubungan dengan adanya perubahan target tersebut sesuai dengan Indikator Kinerja yaitu jumlah perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan.

Apabila nilai V/C telah mencapai nilai 0,8 atau lebih besar, maka dapat dikatagorikan arus yang mendekati kapasitas, sehingga diperlukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Berkaitan dengan itu, perubahan ini dimaksudkan guna mempertahankan kinerja pelayanan lalu lintas dan target realisasi tahun sebelumnya menjadi pedoman perubahan target pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024.

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Merujuk melalui Perjanjian Kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesempatan antar penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*Outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *Outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antar penerima dan pemberian amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan Kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2024 merupakan target kinerja tahun ke-3 dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Demak 2022 – 2026, yang memuat sasaran strategis indikator kinerja tugas fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak yang dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dibawah ini terdapat tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2024:

Tabel 2.7.
Anggaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Tujuan				
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	Angka	79,00	6.354.028.306
	Sasaran				
1.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap perangkat daerah	Nilai yang diperoleh dari hasil kinerja sasaran dibagi jumlah indikator sasaran	%	100	6.354.028.306
	Tujuan				
2	Meningkatkan pelayanan jaringan transportasi	Total dari nilai persepsi perunsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang	%	91,60	26.431.400.000
	Sasaran				
2.1	Terwujudnya pelayanan publik yang responsive	Jumlah pengaduan dibagi jumlah penanganan pengaduan	%	100	26.421.400.000
2.2	Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas	Jumlah perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan	Angka	0,45	10.000.000
Jumlah Total					32.785.428.306

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan kabupaten Demak, 2022 – 2026

Tabel 2.8.
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2024 Perubahan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6
	Tujuan				
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	Angka	79,00	6.468.725.400
	Sasaran				

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap perangkat daerah	Nilai yang diperoleh dari hasil kinerja sasaran dibagi jumlah indikator sasaran	%	100	6.468.725.400
Tujuan					
2	Meningkatkan pelayanan jaringan transportasi	Total dari nilai persepsi perunsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang	%	91,60	26.586.865.000
Sasaran					
2.1	Terwujudnya pelayanan publik yang responsive	Jumlah pengaduan dibagi jumlah penanganan pengaduan	%	100	26.576.865.000
2.2	Meningkatnya kinerja pelayanan lalu lintas	Jumlah perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan	Angka	0,41	10.000.000
Jumlah Total					33.055.590.400

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan kabupaten Demak, 2022 – 2026

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun Anggaran 2024 tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mendapat dukungan anggaran dari APBD yang digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) Program, 15 (lima belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) subkegiatan dengan total sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Dukungan Anggaran dari APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024

No	Program	Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.409.128.306	29.126.590.400	- 282.537.926	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.376.300.000	3.929.000.000	552.700.000	APBD

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

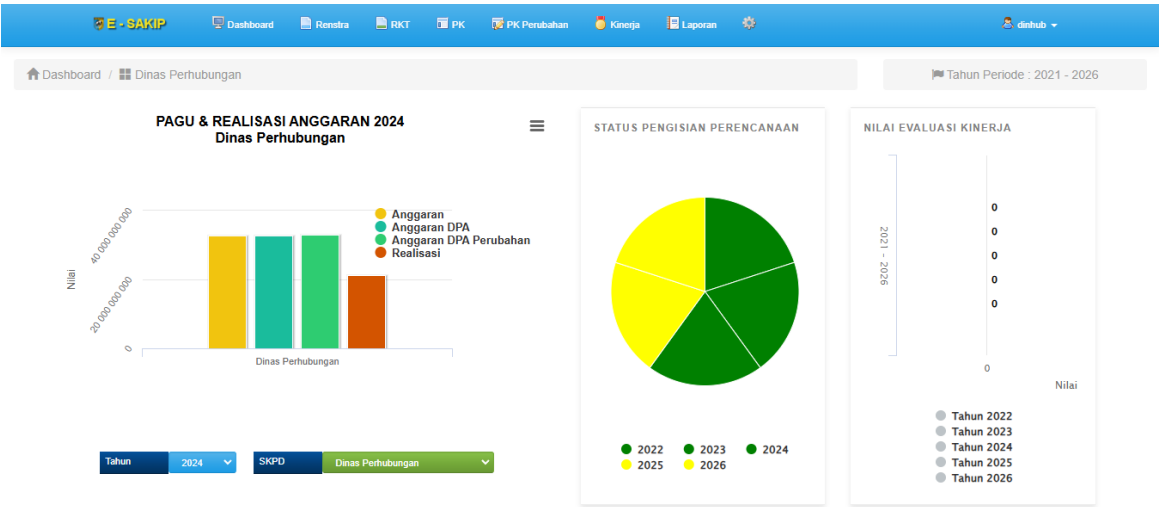
Berdasarkan tabel 2.7. dan 2.8 adanya perubahan anggaran dimana Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota berkurang menjadi Rp. 282.537.926 dan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bertambah sebesar Rp. 552.700.000. perubahan anggaran tersebut digunakan Penambahan Pemenuhan Biaya Operasional Pendampingan Pendapatan PAD Juru Parkir dengan metode Bruto.

2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Capaian Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak adalah aplikasi sebagai berikut:

1. E – Sakip Kab Demak

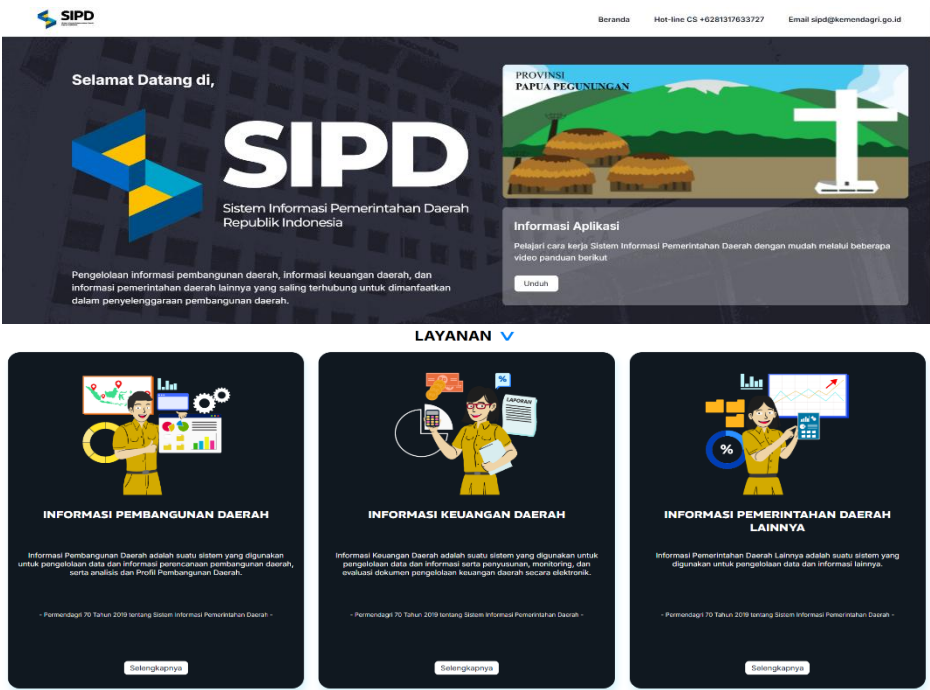
Instrumen pendukung ini digunakan sebagai mengintegritaskan perencanaan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan Perangkat Daerah. Berikut ini adalah gambaran yang website <http://sakip.demakkab.go.id/>:



Gambar 2.1. Sistem Integritas E – Sakip Kab. Demak

2. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia

SIPD RI (Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia) adalah sebagai platform yang dirancang untuk mendukung perencanaan, pengelolaan, penatausahaan/kebendaharaan, dan pelaporan pembangunan daerah. SIPD bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan di tingkat daerah. Berikut gambaran website <https://sipd.kemendagri.go.id/>.



Gambar 2.2. Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang telah ditetapkan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dengan Bupati Demak pada tahun anggaran 2024. Pengukuran hasil evaluasi ini mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Seusi dengan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak tahun 2024 sebagaimana telah diubah dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak tahun 2024 terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, guna mengetahui persentase pencapaian targey kinerja dengan menggunakan 2 (dua) cara diantaranya:

1. Pada Indikator Positif, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakun baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Demak yang menggunakan rumus indikator positif antara lain Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP Dinas Perhubungan, Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang Mencapai Target, Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti.

2. Pada indikator negatif, semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Demak yang menggunakan rumus indikator negatif adalah Kinerja Lalu Lintas Kabupaten.

3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, dibawah ini terdapat tabel capaian kinerja tahun anggaran 2024:

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi		2024			Tingkat Capaian
				2022	2023	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP tiap OPD	Angka	78,94	79,11	79,00	79,56	100,70	Sangat Tinggi
1.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap perangkat daerah	Persentase Indikator Kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan Pelayanan Jaringan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi	%	88,25	90,47	91,60	91,75	100,14	Sangat Tinggi
2.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi		2024			Tingkat Capaian
				2022	2023	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Lalu Lintas	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Angka	0,21	0,22	0,41	0,38	115,56	Sangat Tinggi

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2022 – 2026

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa secara secara keseluruhan 5 (lima) Indiaktor Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Demak tingkat capaian Sangat Tinggi. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dengan hasil tingkat layanan yang sangat tinggi merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling mendukung. Diawali dengan perencanaan strategis yang matang dan terukur, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mampu merumuskan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang spesifik, realistis, dan dapat dicapai.

Implementasi program yang efektif dan efisien, didukung oleh alokasi sumber daya yang memadai, koordinasi yang baik, dan pengawasan yang ketat, menjadi kunci keberhasilan. Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui studi tiru dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota lain guna mengetahui program yang terdapat pada dinas tersebut dan mengimplementasikan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan transportasi, turut memperkuat kinerja dinas.

Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, serta monitoring dan evaluasi yang berkala, memastikan bahwa setiap permasalahan dapat diidentifikasi dan diatasi dengan cepat. Dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, serta regulasi yang mendukung, semakin melengkapi faktor-faktor keberhasilan ini. Dengan sinergi dari seluruh aspek tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak berhasil mencapai IKU dengan tingkat layanan yang sangat tinggi, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Melihat tabel diatas, dibawah ini terdapat penjelasan uraian lebih rinci mengenai realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama yang didapatkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis Kinerja Tujuan 1: “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”
- 1.1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
- sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. SAKIP juga selaras dengan akuntabilitas keuangan. Indikator Kinerja Tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah adalah persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang mencapai target dan



mempunyai definisi operasional nilai yang diperoleh dari hasil kinerja sasaran dibagi jumlah indikator sasaran. Tabel dibawah ini terdapat tabel capaian Indikator Kinerja Utama dan dalam perhitungannya pada tahun 2024 menggunakan hasil nilai SAKIP sementara pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Dinas Perhubungan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		2024			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2024
		2022	2023	Target	Realisasi	Capaian		
1	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	79,11	79,56	79,00	79,56	100,70	80,00	79,33

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mempunyai nilai SAKIP yang di berikan oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masih menggunakan nilai SAKIP terakhir yaitu tahun 2022 dengan hasil sebesar 79,11% dan tahun 79,56 mempunyai capaian sebesar 100,70%.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja sasaran strategis yang telah direncanakan mampu direalisasikan secara optimal. Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan persentase perbandingan antara hasil kinerja sasaran yang diperoleh dengan jumlah indikator sasaran yang ditargetkan.

Dengan demikian, capaian ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam melaksanakan program dan kegiatan strategis yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mempunyai 1 (satu) sasaran yaitu meningkatkan capaian sasaran strategis tiap perangkat daerah yang mana dalam pengukuran hasil realisasinya berkaitan dengan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2022 dan 2023

No.	Komponen	Bobot	Nilai Tahun 2022	Nilai Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	21,90	22,50	0,60
1.a	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	6,00	4,20	4,80	0,60

No.	Komponen	Bobot	Nilai Tahun 2022	Nilai Tahun 2023	Bertambah/ Berkurang
1.b	Dokume Perencanaan Kinerja Telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,20	7,20	-
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	10,50	10,50	-
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	26,10	25,80	- 0,30
2.a	Pengukuran Kinerja tekah dilakukan	6,00	5,40	4,20	- 1,20
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,20	8,10	0,90
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	13,50	13,50	-
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,10	11,26	0,16
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70	2,11	- 0,60
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas pencapaian Kinerja, informasu keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	3,15	3,15	-
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategis/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,25	6,00	0,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00	20,00	-
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal telah dilaksanakan	5,00	4,50	4,50	-
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,75	6,75	-
4.c	Implementasu SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dab efisiensi Kinerja	12,50	8,75	8,75	-
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		79,11	79,56	0,45

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Melihat tabel diatas dan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Donas Perhubungan (DINHUB), capaian Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2023 mempunyai target Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sebesar 79,56 dan digunakan sebagai capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan realisasi sebesar 100,70



dari target 79,00. Capaian terbesar terdapat pada komponen evaluasi Perencanaan Kinerja yang bertambah menjadi 0,60% dibandingkan dengan tahun 2022 sedangkan berkurang - 0,30% pada komponen evaluasi pengukuran Kinerja dibandingkan dengan tahun 2022. Dari hasil tersebut, perbandingan hasil penilaian tahun sebelumnya tahun 2022 secara keseluruhan dari hasil evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Demak meningkat sebesar 0,45% dari 79,11% menjadi 79,56% pada tahun 2023.

Sehubungan atas hasil evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan tahun 2023, pastinya terdapat catatan - catatan guna meningkatkan nilai SAKIP di waktu yang akan mendatang perlu dilakukan hal – hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, utamanya mengenai Sistem Penilaian dengan Mempertimbangkan capaian nilai Evaluasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk mempertahankan dan 5 (lima) tahun untuk meningkatkan nilai, maka Dinas Perhubungan yang telah memperoleh nilai “BB”, agar meningkatkan nilai tersebut dengan pemenuhan seluruh komponen penilaian untuk tahun selanjutnya.
2. Terhadap rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun 2023 yang diselesaikan, agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi evaluasi.
3. Guna menghindari terjadinya temuan yang berulang, maka kondisi negatif yang diungkapkan dari hasil evaluasi untuk dimasukkan dalam risk register untuk masing – masing komponen. Mendasarkan risk register dimaksud, Manajemen wajib menyusun analisis risikonya dan menyusun rencana tindak pengendalian (RTP).
4. RTP yang telah disusun oleh Manajemen wajib menjadi bahan monitoring dan evaluasi periodik guna memastikan progres dan konsistensi pelaksanaannya.
5. Untuk menjamin pemanfaatan LKJiP maka dapat didorong munculnya inovasi yang mampu memberikan efek peningkatan 3E ekonomis, efektif dan efisien baik level strategi maupun operasional.
6. Mencermati hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Bappelitbangda Kabupaten Demak utamanya dalam hal meningkatkan kualitas penyusunan pohon kinerja, *Cross cutting* dan *Cascading* agar mampu menjamin integritas peran antar unit dan lintas perangkat daerah.

Adapun tujuan 1 “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” Dinas Perhubungan mempunyai 1 (satu) sasaran “Meningkatnya Sasaran Strategis Perangkat Daerah”. Adapun penjelasanya dari sasaran adalah sebagai berikut:

1.2. Analisis Kinerja Sasaran 3.”Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah”

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah” dengan indikator persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang mencapai target adalah 100% dan masuk dalam kategori “**Sangat Tinggi**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5.
Capaian Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang Mencapai Target

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		2024			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2024
		2022	2023	Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang Mencapai Target	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Indikator Kinerja Sasaran meningkatnya capaian sasaran strategis perangkat daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak keseluruhan dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tercapai 100% dari target 100%. Adapun berikut ini faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:

1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian kinerja sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat.
2. Terjalannya komunikasi, koordinasi dan konsultasi baik internal maupun dengan instansi lain atau pihak terkait.

Dalam pencapaian sasaran ini, adapun strategis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara rutin.
2. Melakukan identifikasi dan merumuskan solusi/ inovasi dalam menghadapi permasalahan/ hambatan.
3. Meningkatkan kolaborasi antar onstansi baik internal maupun eksternal dengan menjalin komunikasi, koordinasi dan konsultasi yang baik.

Guna meningkatkan sasaran strategis perangkat daerah dengan indikatpr kinerja persentase indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah yang mencapai target dicapai melalui program, kegiatan dan subkegiatan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Anggaran Indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja		Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capian (%)	
		Target	Realisasi			Anggaran	Kinerja
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	27.550.000	26.840.000	97,42	100,00
a	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	4	4	27.550.000	26.840.000	97,42	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	2	6.441.175.400	6.163.296.329	95,69	100,00
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28	28	3.827.734.600	3.661.064.405	95,65	100,00
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	2.613.44.800	2.502.231.924	95,74	100,00
Jumlah Total				6.468.725.400	6.190.136.329	95,69	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Berdasarkan tabel diatas, Sasaran Persentase Strategis Perangkat Daerah yang mencapai target mendukung 1 (satu) Program dan 2 (dua) Kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.190.136.329 dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.468.725.400 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 95,69%. Sedangkan untuk Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran Rp. 26.840.000 dari pagu Rp. 27.550.000 dengan pencapaian realisasi 97,42% dan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mempunyai realisasi sebesar Rp. 3.163.296.329 dari pagu 6.441.175.400 dengan realisasi sebesar 95,69%. Program ini mempointai indikator Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Berhubungan dengan hal tersebut, terdapat analisis tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran terdapat alokasi anggaran yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7.
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Indikator Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang Mencapai Target

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap perangkat daerah	Persentase Indikator Kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100	6.468.725.400	6.190.136.329	95,69	4,31
Rata – Rata Capaian					100	6.468.725.400	6.190.136.329	95,69	4,31
Tingkat Efisiensi 4,31%									
Tingkat Efektivitas 100%									

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Berdasarkan tabel diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak pada tahun 2024 dengan sasaran meningkatnya capaian sasaran strategis tiap perangkat daerah mempunyai tingkatan Efisiensi sebesar 4,31% atau sebesar Rp. 278.589.071 dan tingkatan Efektifitas sebesar 100%.

2. Analisis Kinerja Tujuan 1. “Meningkatkan Pelayanan Jaringan Transportasi”
- Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan tujuan meningkatkan pelayanan jaringan transportasi merupakan komitmen yang sangat penting bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.
- Tujuan utama dari peningkatan pelayanan ini adalah untuk memperbaiki kualitas infrastruktur transportasi, meningkatkan aksesibilitas, serta memastikan kelancaran arus transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat secara optimal. Dalam mencapai tujuan ini, Dinas Perhubungan memfokuskan perhatian pada berbagai elemen penting dalam jaringan transportasi, seperti perbaikan jalan, penyediaan sarana transportasi yang memadai, dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait.
- Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi. Indeks ini dirancang untuk menggambarkan sejauh mana masyarakat merasa puas dengan kualitas layanan transportasi yang diberikan, baik dalam hal kenyamanan, kecepatan, keamanan, maupun ketersediaan sarana transportasi. Penilaian terhadap kepuasan masyarakat ini dilakukan melalui survei rutin yang melibatkan berbagai lapisan

pengguna transportasi, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem transportasi yang ada. Dengan demikian, Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi menjadi instrumen yang sangat berguna dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelayanan transportasi di Kabupaten Demak.

Melalui indikator ini, diharapkan Dinas Perhubungan dapat terus melakukan langkah-langkah perbaikan yang berbasis pada masukan langsung dari masyarakat, serta menjamin bahwa kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar memenuhi harapan pengguna layanan. Dalam jangka panjang, peningkatan pelayanan jaringan transportasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperlancar arus barang dan jasa, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Demak.

Sehubungan dengan hal tersebut, hasil pengukuran capaian kinerja tujuan Meningkatkan Pelayanan Jaringan Transportasi dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		2024			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2024
		2022	2023	Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi	88,25	90,47	91,60	96,95	105,84	95,90	104,45

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi setiap tahun mengalami peningkatan realisasi setiap tahunnya, terutama pada tahun 2024 dimana Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi yang mempunyai realisasi sebesar 96,95% dari target 91,60% dengan hasil capaian 105,84%. Berikut ini adalah formulasi perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Indeks SKM} &= \frac{\text{IKM Unit Pealayanan}}{\text{Target IKM Unit Pelayanan}} \times 100 \\ \text{Indeks SKM} &= \frac{88,81}{91,60} \times 100 \\ \text{Indeks SKM} &= 96,95 \end{aligned}$$

Melihat perhitungan diatas, guna melihat seberapa banyak responden hasil analisis survey kepuasan masyarakat dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, berikut ini adalah faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan:

1. Kualitas Infrastruktur Transportasi

Keberhasilan pelayanan jaringan transportasi sangat bergantung pada kualitas infrastruktur yang ada, seperti Penyediaan Fasilitas Keselamatan Perlengkapan Jalan dan Sarana dan Prasarana Transportasi. Infrastruktur yang baik dan terawat dengan baik akan mendukung kelancaran dan keamanan transportasi, yang berujung pada kepuasan masyarakat.

2. Keamanan dan Keselamatan

Faktor keamanan dan keselamatan dalam berkendara, baik untuk pengemudi maupun penumpang, merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepuasan masyarakat. Kecelakaan yang sering terjadi atau kurangnya perhatian terhadap keselamatan dapat menurunkan kepercayaan dan kepuasan pengguna layanan transportasi.

3. Partisipasi Masyarakat dan Pengguna Jasa Transportasi

Tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, keluhan, atau saran mengenai layanan dan jasa transportasi juga dapat mempengaruhi keberhasilan tujuan ini. Sistem feedback yang baik memungkinkan evaluasi layanan yang lebih efektif, sementara kesadaran masyarakat dalam menggunakan transportasi umum dengan bijak akan mendukung kelancaran sistem transportasi.

4. Teknologi dan Inovasi

Penggunaan teknologi dalam sistem transportasi, seperti aplikasi pemantauan lalu lintas, sistem informasi kepada pengguna, atau teknologi pemeliharaan kendaraan, dapat meningkatkan efisiensi layanan. Inovasi dalam sarana dan prasarana transportasi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna.

Berakitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya mempunyai indikator kinerja tujuan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Demak bersama dengan Bupati Demak terdapat 2 (dua) Capaian Indikator Tujuan diantaranya sebagai berikut:

2.1. Analisis Kinerja Sasaran 1. “Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif”

Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif mempunyai Indikator Sasaran Tujuan yaitu Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti serta mempunyai definisi operasional dimana hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas sasaran strategis yang mencapai target guna mengevaluasi seberapa besar kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan.

Melihat hal tersebut, capaian terwujudnya pelayanan publik yang responsif sebagai cerminan pengukuran sejauh mana Dinas Perhubungan menindaklanjuti keluhan masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab dalam memberikan layanan yang efektif dan efisien, menunjukkan keseriusan dalam merespons dan menyelesaikan keluhan masyarakat sebagai indikator kinerja tujuan dari kualitas pelayan publik yang diberikan serta memberikan pelayanan yang terukur, responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Tabel 3.9.
Capaian Indikator Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		2024			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2024
		2022	2023	Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Melihat tabel diatas, diketahui bahwa Dinas Perhubungan dalam pelaksanaannya setiap tahunnya realisasi Indikator Kinerja Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti dengan cara mempertahankan dengan capaian realisasi 100. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi hasil realisasi:

1. Kecepatan Respons terhadap Keluhan
- Waktu respon sangat mempengaruhi kepuasan masyarakat. Semakin cepat keluhan ditindaklanjuti, semakin besar peluang untuk mencapai target 100%. Proses yang lambat dalam penanganan keluhan dapat menurunkan tingkat kepuasan masyarakat dan berdampak pada hasil realisasi yang rendah.
 - Sistem pelaporan yang efektif: Menggunakan sistem pelaporan atau kanal komunikasi yang mudah diakses masyarakat (misalnya, aplikasi online, hotline, atau platform media sosial) untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan respons cepat.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Cukup dan Kompeten
- Kualitas petugas yang menangani keluhan sangat mempengaruhi proses penyelesaian keluhan. Petugas yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik, pemahaman terhadap prosedur, dan kemampuan untuk menangani keluhan secara efisien sangat penting.



- Pelatihan rutin bagi staf yang bertugas untuk menangani keluhan, agar mereka memiliki pengetahuan yang memadai tentang prosedur penanganan dan dapat memberikan solusi yang tepat.
3. Sisten Pengelolaan Keluhan yang Terstruktur
- Sistem pencatatan dan pemantauan yang baik untuk setiap keluhan sangat penting agar semua keluhan tercatat dengan jelas dan ditindaklanjuti secara tepat waktu. Jika sistem ini berjalan dengan efisien, keluhan yang masuk dapat segera dikelola dan didistribusikan ke pihak yang tepat untuk ditindaklanjuti.
 - Database yang terorganisir dengan baik untuk memonitor status keluhan dan memastikan bahwa setiap keluhan sudah direspon dan diselesaikan sesuai dengan prosedur.
4. Koordinasi Antar Unit dan Lembaga Terkait
- Penanganan keluhan yang baik membutuhkan koordinasi yang efektif antara Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya (seperti polisi, dinas PU, atau perusahaan transportasi). Ketika masalah yang dilaporkan membutuhkan peran beberapa pihak, koordinasi yang baik sangat penting untuk menyelesaikan keluhan secara tuntas.
 - Kolaborasi dengan pihak ketiga (misalnya, operator angkutan umum) untuk memastikan masalah yang berkaitan dengan penyedia layanan bisa segera diatasi.
5. Evaluasi dan Umpan Balik (Feedback) yang Efektif
- Sistem evaluasi dan umpan balik yang terstruktur penting untuk mengetahui sejauh mana keluhan yang telah ditindaklanjuti memenuhi harapan masyarakat. Dengan adanya feedback, Dinas Perhubungan dapat mengetahui apakah penyelesaian keluhan sudah memadai atau ada langkah perbaikan lebih lanjut yang perlu dilakukan.
 - Survei kepuasan setelah penanganan keluhan untuk mengukur apakah masyarakat merasa puas dengan cara dan kecepatan penanganan keluhan tersebut.
6. Budaya Responsif dan Kepedulian terhadap Masyarakat
- Budaya pelayanan yang responsif di dalam organisasi Dinas Perhubungan sangat mempengaruhi kecepatan dan kualitas penanganan keluhan. Budaya yang mendorong pegawai untuk cepat tanggap terhadap masalah yang ada dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat akan meningkatkan peluang tercapainya realisasi 100%.
 - Kesadaran tentang pentingnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik akan menjadi motivasi tambahan bagi pegawai untuk

menindaklanjuti keluhan dengan cepat dan menyelesaikan masalah secara efektif.

7. Keterlibatan dan Komitmen Pimpinan

- Komitmen dari pimpinan Dinas Perhubungan untuk memprioritaskan penanganan keluhan dan memastikan bahwa setiap keluhan ditindaklanjuti dengan serius akan sangat mempengaruhi hasil yang dicapai. Pimpinan yang memberikan perhatian terhadap proses ini akan mendorong seluruh pegawai untuk bekerja dengan lebih efisien dan efektif.
- Pengawasan dan tindak lanjut dari pimpinan dalam memastikan bahwa target capaian 100% keluhan ditindaklanjuti dapat memotivasi tim untuk bekerja lebih optimal.

8. Keterbukaan dan Transparansi dalam Penanganan Keluhan

- Transparansi dalam proses penanganan keluhan penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Menyediakan informasi yang jelas tentang bagaimana keluhan ditindaklanjuti, serta hasil akhirnya, akan memberikan rasa puas kepada masyarakat.
- Pemberian informasi yang jelas mengenai waktu estimasi penyelesaian keluhan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah.

Faktor keberhasilan ini sangat mempunyai dukungan Anggaran sumber dana yang digunakan dalam Indikator tujuan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2024 dan terdapat 2 (dua) Program diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). Berikut ini adalah rincian dukungan anggaran capaian pada masing – masing kegiatan yang masuk dalam Capaian Indikator Tujuan:

Tabel 3.10.
Dukungan Anggaran Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja		Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi (%)	
		Target	Realisasi			Keu.	Fisik
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	22.657.865.000	22.447.565.655	99,07	100,00
1.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	123.560.000	119.290.000	97,35	100,00

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja		Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi (%)	
		Target	Realisasi			Keu.	Fisik
a	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	1	1.110.000	1.000.000	90,09	100,00
b	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	77	77	122.450.000	119.290.000	97,42	100,00
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	241.141.841	233.560.807	96,86	100,00
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	10.000.000	9.871.900	98,72	100,00
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	71.564.000	69.480.750	97,09	100,00
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1	17.137.000	15.991.000	93,31	100,00
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	20.000.000	18.705.700	93,53	100,00
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	20.000.000	17.149.500	85,75	100,00
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	102.440.841	102.361.957	99,92	100,00
1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	2	35.300.000	32.495.000	92,05	100,00
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	2	35.300.000	32.495.000	92,05	100,00
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	21.981.969.159	21.806.110.998	99,20	100,00
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	21.978.469.159	21.802.610.998	99,20	100,00
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	6	275.894.000	255.108.850	92,47	100,00
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	4	165.894.000	148.441.683	89,48	100,00
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	2	2	70.000.000	67.138.500	95,91	100,00

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja		Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi (%)	
		Target	Realisasi			Keu.	Fisik
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	4	15.000.000	14.775.000	98,50	100,00
d	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	2	25.000.000	24.753.667	99,01	100,00
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100	100	3.919.000.000	3.847.007.127	98,16	100,00
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100	100	2.773.262.000	2.735.201.095	98,12	100,00
a	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10	10	2.683.262.000	2.645.651.095	98,60	100,00
b	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2	2	90.000.000	89.550.000	99,50	100,00
2.2	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	4	4	50.000.000	45.654.500	91,31	100,00
a	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	1	50.000.000	45.654.500	91,31	100,00
2.3	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	100	170.000.000	169.528.560	99,72	100,00
a	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1	1	20.000.000	19.835.000	99,18	100,00
b	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1600	1600	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00
c	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	11	11	110.000.000	109.693.560	99,72	100,00
2.4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	2	2	510.000.000	484.643.000	95,03	100,00

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja		Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi (%)	
		Target	Realisasi			Keu.	Fisik
a	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4	4	350.000.000	333.485.500	95,28	100,00
b	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4	4	160.000.000	151.157.500	95,47	100,00
2.5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2	2	5.000.000	4.890.000	97,80	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2	2	5.000.000	4.890.000	97,80	100,00
2.6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2	2	343.038.000	341.436.472	99,53	100,00
a	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	2	2	75.000.000	74.318.472	99,09	100,00
b	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12	12	268.038.000	267.118.000	99,66	100,00
2.7	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	2	67.700.000	65.653.500	96,98	100,00
a	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	42.700.000	40.835.000	95,63	100,00
b	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	25.000.000	24.818.500	98,60	99,70
Jumlah Total				26.576.865.000	26.294.572.782	98,61	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Melihat tabel diatas, Capaian Indikator Kinerja Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pagu anggaran Rp. 26.576.865.000 dan realisasi sebesar Rp. 26.294.572.782 serta mempunyai persentase 98,61%. Dengan

demikian, efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah mampu mengelola sumber daya secara optimal untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tabel realisasi anggaran diatas, terdapat tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya atas Kinerja Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti sebagai berikut:

Tabel 3.11.
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti yang Mencapai Target

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
2.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Kinerja Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	26.576.865.000	26.294.572.782	98,61	7,39
Rata – Rata Capaian					100	26.576.865.000	26.294.572.782	98,61	7,39
Tingkat Efisiensi 7,39%									
Tingkat Efektivitas 100%									

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Berdasarkan tabel diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak pada tahun 2024 dengan sasaran meningkatnya capaian sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif mempunyai tingkatan Efisiensi sebesar 7,39% atau sebesar Rp. 282.292.218 dan tingkatan Efektifitas sebesar 100%.

2.2. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Lalu Lintas

Kinerja Lalu Lintas Kabupaten serta mempunyai definisi operasional dimana Kinerja Lalu Lintas atau V/Ratio diperoleh dari perbandingan volume Lalu lintas dibagi dengan kapasitas jalan, besarnya yang secara teoritis antara 0 – 1, yang artinya jika nilai tersebut mendekati angka 1 maka kondisi jalan tersebut sudah mendekati jenuh. Hal tersebut berhubungan dengan tingkat pelayanan ruas jalan sesuai dengan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI). Perhatikan tabel dibawah ini adalah hasil pengukuran capaian kinerja dengan metode indikator negatif:

Tabel 3.12.
Capaian Indikator Kinerja Lalu Lintas Kabupaten

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		2024			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2024
		2022	2023	Target	Realisasi	Capaian		
1	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,21	0,22	0,41	0,38	115,56	0,50	134,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Sehubungan dengan tabel diatas, hasil realisasi Kinerja Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Demak melakukan dilaksanakan survey kinerja lalu lintas di seluruh ruas jalan Kabupaten dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.13.
Pelaksanaan Hasil Kinerja Lalu Lintas

No	Nama Ruas	Volume (smp/jam)	Kapasitas	V/C ratio	Tingkat pelayanan
1	Jalan Karanganyar – Wilalung	789	1494	0,53	C
2	Jalan Karanganyar – Bengkal	204	1494	0,14	A
3	Jalan Gajah - Dempet	640	1494	0,43	B
4	Jalan Gajah – Geneng	382	1494	0,26	B
5	Jalan Trengguli - Demung	586	2321	0,25	B
6	Jalan Dempet – Mintreng	341	1494	0,23	B
7	Jalan Jogoloyo – Wonosalam	984	2321	0,42	B
8	Jalan Wonosalam – Tlogosih	321	1494	0,22	B
9	Jalan Demak - Bonang	941	2321	0,41	B
10	Jalan Bonang – Ngawen	731	1494	0,49	C
11	Jalan Bonang – Morodemak	314	2321	0,14	A
12	Jalan Wedung – Bungo	409	1494	0,27	B
13	Jalan Onggorawe - Mranggen	1219	2321	0,53	C
14	Jalan Mranggen - Kebonbatur	947	2321	0,41	B
15	Jalan Mranggen - Banyumeneng	864	2245	0,38	B
16	Jalan Guntur - Buyaran	478	2372	0,20	A
17	Jalan Karantengah - Tambakbulusan	1459	2321	0,63	C
18	Jalan Sunan Kalijaga	1870	2973	0,63	C
19	Jalan Pemuda	776	2069	0,38	B
20	Jalan Sultan Fatah (depan pasar bintoro)	1367	2731	0,50	C
21	Jalan Sultan Fatah (depan SMP 1)	1435	6344	0,23	B
22	Jalan Nur Cahya	1118	1494	0,75	C
Jumlah Rata – Rata V/C Rasio		18176	48428	0,38	B
Median (Nilai Tengah) 0,40					

Sumber: Hasil Survey Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Pelaksanaan survey Kinerja Lalu Lintas terdapat 22 ruas jalan Kabupaten dengan tingkat layanan masing – masing ruas berbeda dikarenakan setiap ruas jalan mempunyai kriteria tersendiri baik tingkat kepadatan lalu lintas dan lebar jalurnya, tabel berikut ini menerangkan karakteristik tingkat pelayanan sesuai tingkat layanan (LOS) ruas jalan:

Tabel 3.14.
Karakteristik Tingkat Pelayanan

Tingkat Layanan (LOS)	Karakteristik	V/C
A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan	0,0 – 0,20

Tingkat Layanan (LOS)	Karakteristik	V/C
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan	0,20 – 0,44
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan.	0,45 – 0,74
D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dikendalikan	0,75 – 0,84
E	Volume lalu lintas mendekati/ berada pada kapasitas, arus tidak stabil, terkadang berhenti	0,85 – 1,00
F	Arus yang dipaksa atau macet, kecepatan rendah, volume dibawah kapasitas. Antrian Panjang dan terjadi hambatan – hambatan yang besar	>1,00

Sumber: MKJI, 1997

Melihat tabel 3.9 Kinerja Lalu Lintas diatas, Kriteria kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan tertentu yang terkait dengan geometrik, arus lalu lintas, dan lingkungan jalan untuk kondisi eksisting maupun untuk kondisi desain. Semakin rendah nilai derajat kejenuhan atau semakin tinggi kecepatan tempuh menunjukan semakin baik kinerja lalu lintas.

Untuk memenuhi kinerja lalu lintas yang diharapkan, diperlukan beberapa alternatif perbaikan atau perubahan jalan terutama geometrik. Persyaratan teknis jalan menetapkan bahwa untuk jalan arteri dan kolektor, jika derajat kejenuhan sudah mencapai 0,75, maka segmen jalan tersebut sudah harus dipertimbangkan untuk ditingkatkan kapasitasnya, misalnya dengan menambah lajur jalan. Untuk jalan lokal, jika derajat kejenuhan sudah mencapai 0,90, maka segmen jalan tersebut sudah harus dipertimbangkan untuk ditingkatkan kapasitasnya.

Cara lain untuk menilai kinerja lalu lintas adalah dengan melihat derajat kejenuhan eksisting yang dibandingkan dengan derajat kejenuhan desain sesuai umur pelayanan yang diinginkan. Jika derajat kejenuhan desain terlampaui oleh derajat kejenuhan eksisting, maka perlu untuk merubah dimensi penampang melintang jalan untuk meningkatkan kapasitasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini adalah formula perhitungan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Tahun 2024:

$$\frac{V}{C} Rasio = \frac{Volume\ Lalu\ Lintas}{Kapasitas\ Jalan}$$

Volume Lalu Lintas : 18.176

Kapasitas Jalan : 48.428

$$\frac{V}{C} Rasio = \frac{18.176}{48.428} = 0,38$$

Berdasarkan hasil Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Tahun 2024 sebesar 0,38 masuk dalam katakteristik tingkat layanan (LOS) B atau V/C <0,44 dimana Arus

stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan. Dalam mengevaluasi kinerja lalu lintas jaringan jalan kabupaten penting untuk mencermati berbagai faktor yang mempengaruhi mobilitas, keamanan dan efisiensi transportasi di wilayah tersebut. Melalui analisis yang cermat, kami telah menarik beberapa kesimpulan yang penting dalam menyoroti kondisi lalu lintas di Kabupaten ini.

Pertama – tama kami mengamati bahwa lalu lintas di jaringan jalan Kabupaten ini memnunjukkan pola bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti waktu, musim, dan peristiwa khusus. Meskipun demikian, kami mengidentifikasi beberapa titik kepadatan dibandingkan dengan kinerja lalu linats di ruas jalan lainnya hanya saja masih dalam tingkatan pelayanan baik.

Selain itu, dalam melakukan evaluasi terhadap keamanan lalu lintas, kami mencatat adanya tren peningkatan atau penurunan kecelakaan lalu lintas di berbagai ruas jalan. Evaluasi ini memberikan wawasan penting dalam upaya meningkatkan infrastruktur keselamatan jalan dan kesadaran pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas.

Dalam konteks efisiensi transportasi, kami melihat bahwa terdapat potensi peningkatan kapasitas dan pengelolaan lalu lintas yang lebih baik melalui penerapan teknologi dan strategi pengaturan lalu lintas yang inovatif. Langkah-langkah ini dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan jaringan jalan kabupaten serta meminimalkan kemacetan dan waktu perjalanan.

Secara keseluruhan, evaluasi kinerja lalu lintas jaringan jalan kabupaten ini merupakan langkah awal yang penting dalam merancang strategi transportasi yang holistik dan berkelanjutan. Kami berharap hasil survei yang kami lakukan dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang efektif dan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kualitas transportasi di kabupaten ini.

Faktor keberhasilan ini sangat mempunyai dukungan Anggaran sumber dana yang digunakan dalam Indikator tujuan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2024:

Tabel 3.15.
Dukungan Anggaran Realisasi dan Capaian Indikator Meningkatkan Kinerja Pelayanan Lalu Lintas

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja		Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi (%)	
		Target	Realisasi			Keu.	Fisik
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100	100	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Kinerja		Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi (%)	
		Target	Realisasi			Keu.	Fisik
1.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	1	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
a	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	1	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten terdapat dukungan anggaran yang digunakan sebagai kelancaran pelaksanaan survey. Pagu anggaran Rp. 10.000.000 dan realisasi Rp. 10.000.000 (100%). Dengan demikian, efektivitas dalam survey, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah mampu mengelola sumber daya secara optimal untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel realisasi anggaran diatas, terdapat tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya atas Kinerja Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti sebagai berikut:

Tabel 3.16.
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Lalu Lintas Kabupaten

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Lalu Lintas	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	100	100	100	10.000.000	10.000.000	100	-
Rata – Rata Capaian					100	10.000.000	10.000.000	100	-
Tingkat Efisiensi 0%									
Tingkat Efektivitas 100%									

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Berdasarkan tabel diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak pada tahun 2024 dengan sasaran meningkatnya capaian sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif mempunyai tingkatan Efisiensi sebesar 0% atau sebesar Rp.0 dan tingkatan Efektifitas sebesar 100%.

- 2.3. Perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama dengan daerah Kabupaten lain tahun 2024
- Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak tentunya akan berbeda dengan Dinas Perhubungan pada daerah Kabupaten lainnya, sehingga ada beberapa Indikator Kinerja Utama yang tidak

bisa dibandingkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mencari perbandingan yang relatif sama sesuai dengan Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran. Merujuk hal tersebut, dibawah ini terdapat tabel perbandingan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.17.
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama dengan Dinas Perhubungan Daerah lain

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak						Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman				
No	Tujuan	Sasaran	Target	Realisasi	%	Tujuan	Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP tiap OPD	79,00	79,56	100,70	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	84,25	84,70	100
1.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap perangkat daerah	Persentase Indikator Kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100	NA	NA	NA	NA	NA
2	Meningkatkan Pelayanan Jaringan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi	91,60	91,75	100,14	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perangkat Daerah	81,50	85,94	105,45
2.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	NA	NA	NA	NA	NA
2.2	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Lalu Lintas	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,41	0,38	115,56	Meningkatnya kualitas kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya kualitas kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Indeks Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0,62	0,64	101,59

Sumber: LKJiP Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, 2024

Berdasarkan tabel diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mempunyai Indikator Kinerja Utama lebih banyak dibandingkan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, hanya saja beberapa target Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman mempunyai target yang lebih besar seperti Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai SAKIP) dengan realisasi sebesar 84,70 dari target 84,25 sedangkan untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mempunyai realisasi sebesar 79,56 dari target 79,00 dan Sasaran Meningkatnya kualitas Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (Indeks Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kinerja Lalu Lintas Kabupaten) Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman mempunyai realisasi 0,64 dari target 0,62 sedangkan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mempunyai realisasi sebesar 0,38 dari target 0,41.

3.2. Inovasi

Pemanfaatan Teknologi dalam Meningkatkan Pemantauan Lalu Lintas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik di bidang transportasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak terus melakukan pembaruan dan inovasi terhadap sistem dan teknologi pemantauan lalu lintas. Pada tahun 2024, Dinas Perhubungan mengembangkan sebuah sistem berbasis aplikasi Android bernama Si Pantas Aksi. Aplikasi ini dirancang untuk menampilkan tayangan langsung (live streaming) dari kamera CCTV yang terpasang di sejumlah titik jalan Kabupaten Demak. Namun, akses terhadap aplikasi ini masih dibatasi untuk kalangan internal Dinas Perhubungan dan stakeholder terkait, mengingat sistem masih dalam tahap uji coba.

Dari hasil survei kinerja lalu lintas yang dilakukan khususnya di ruas jalan nasional (Pantura), ditemukan adanya peningkatan volume kendaraan. Kondisi ini semakin kompleks dengan adanya gangguan banjir rob yang kerap terjadi di wilayah Kecamatan Sayung. Dengan tantangan tersebut, kebutuhan akan pemantauan lalu lintas secara real-time menjadi sangat penting, terutama untuk membantu masyarakat dalam memilih jalur alternatif dari arah Semarang maupun sebaliknya, guna menghindari kemacetan atau daerah rawan banjir.

Namun demikian, dalam perjalanannya, Aplikasi Si Pantas Aksi mengalami sejumlah kendala teknis yang menyebabkan sistem sering mengalami error dan tidak stabil. Akibatnya, pada pertengahan tahun 2024, aplikasi tersebut dinyatakan tidak lagi beroperasi secara efektif.

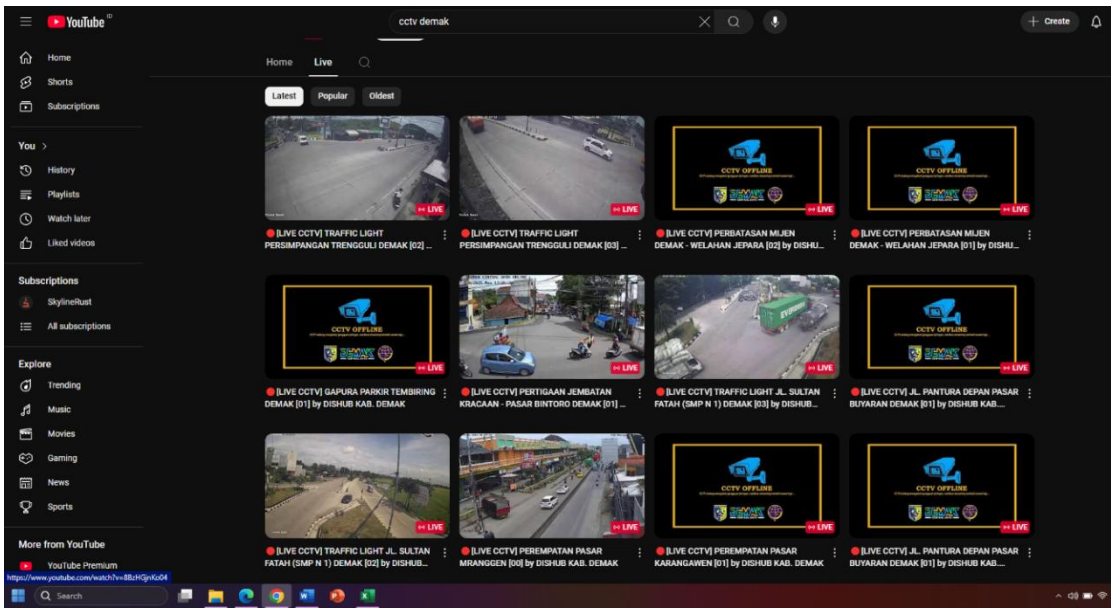
Menanggapi hal tersebut, Dinas Perhubungan melakukan langkah cepat dengan memindahkan layanan pemantauan CCTV ke platform yang lebih stabil dan mudah diakses, yakni YouTube. Inovasi ini memungkinkan masyarakat luas untuk memantau kondisi lalu lintas secara langsung dan real-time melalui kanal YouTube resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Selain menjangkau audiens yang lebih luas, solusi ini juga memberikan kemudahan akses tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Masyarakat kini dapat memantau kondisi lalu lintas kapan saja dan di mana saja, selama tidak terdapat gangguan teknis pada perangkat CCTV di lapangan.

Adapun tayangan CCTV dapat diakses melalui kanal berikut:

 <https://www.youtube.com/@cctvdishubdemak/streams>

Inovasi ini menunjukkan komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam memberikan layanan yang adaptif, responsif, dan transparan kepada

masyarakat, khususnya dalam pengelolaan informasi lalu lintas secara digital dan terbuka.



Gambar 3.1. Streaming CCTV Jalan Dishub Demak

3.3. Realisasi Anggaran

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak tahun 2024 mempunyai ringkasan pendapatn dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah pendapatan yang bersumber atau yang dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, laba dari BUMD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak memiliki kewajiban untuk memungut Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, dan Retribusi Tempat Parkir Khusus dan pada tahun 2024 Pengujian Kendaraan Bermotor yang awalnya pada tahun sebelumnya mempunyai pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun ini tidak diberlakukannya pemungutan atau gratis.

Sehubungan dengan pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi capaian pelaksanaan pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Demak pembayaran Retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada BPKPAD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18. Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE	SISA ANGGARAN
1	Retribusi Jasa Umum	600.000.000	596.800.000	99,47%	(3.200.000)
-	Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum	600.000.000	596.800.000	99,47%	(3.200.000)
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	600.000.000	596.800.000	99,47%	(3.200.000)

NO	JENIS PENDAPATAN		TARGET	REALISASI	PROSENTASE	SISA ANGGARAN
2	Retribusi Jasa Usaha		2.616.875.000	2.816.630.000	107,63%	199.755.000
	-	Retribusi Terminal	-	100.000	-	100.000
		Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan	-	100.000	-	100.000
	-	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.616.875.000	2.816.530.000	107,63%	199.655.000
		Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Taman Parkir TIC	72.000.000	126.300.000	175,42%	54.300.000
		Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Taman Parkir Makam Kadilangu	-	1.020.000	-	1.020.000
		Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Taman Parkir tembiring Jogo Indah	200.000.000	229.595.000	114,80%	29.595.000
		Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Taman Parkir Masjid Agung Demak	90.000.000	90.000.000	100,00%	-
		Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Retribusi Parkir Dalam Lingkungan Pasar	2.254.875.000	2.369.615.000	105,09%	114.740.000
JUMLAH			3.216.875.000	3.413.430.000	106,11%	196.555.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Dinas Kabupaten Demak mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana target awal 2.081.026.800 dan diperubahan mengalami peningkatan sebesar 3.216.875.000 Alokasi Total Anggaran Retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sebesar Rp. 3.216.875.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.413.430.000 (106,11%). Berkaitan dengan hal tersebut, retribusi dibagi menjadi 2 (dua) jenis pendapatan diantaranya Retribusi Jasa Umum yang mempunyai rata – rata presentase 99,47% dan Retribusi Jasa Usaha mempunyai presentase 107,63% dengan total jumlah antara kedua retribusi tersebut sebesar Rp. 196.555.000 atau presentase sebesar 106,11%.

Menunjuk hasil diatas, diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak melampaui Jumlah dan presentase yang ditargetkan, keberhasilan ini terletak pada Retribusi Jasa Usaha Dimana mempunyai realisasi sebesar Rp. 2.816.630.000 dari target sebesar Rp. 2.616.875.000 atau mencapai presentase 107,63%. Sedangkan Retribusi Jasa Umum mempunyai realisasi sebesar Rp. 596.800.000 dari target sebesar Rp. 600.000.000 atau mencapai presentase 99,47%.

Tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) bidang perparkiran yang mencapai persentase sebesar 106,11% menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor perparkiran melebihi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan dalam mengoptimalkan potensi yang ada di sektor perparkiran, yang meliputi pemungutan pajak parkir, retribusi parkir, serta pengelolaan area parkir yang lebih efektif.

Beberapa faktor yang bisa menjelaskan pencapaian tersebut antara lain adalah peningkatan jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir, baik yang ada di kawasan publik maupun di tempat-tempat strategis lainnya. Selain itu, upaya pemda dalam memperbaiki sistem pengelolaan perparkiran, seperti penerapan sistem parkir elektronik atau digital yang lebih efisien dan mudah diakses, juga berkontribusi besar terhadap kenaikan pendapatan dari sektor ini.

Keberhasilan ini juga bisa dihasilkan dari penataan ulang ruang parkir yang lebih terorganisir dan adanya peningkatan tarif parkir yang lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Program edukasi kepada masyarakat terkait kewajiban membayar retribusi parkir dan peningkatan pengawasan terhadap pemungutan parkir yang lebih transparan, turut mendukung pencapaian PAD bidang perparkiran yang optimal.

Secara keseluruhan, pencapaian PAD bidang perparkiran yang lebih dari 100% ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam mengelola dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor ini. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi keuangan daerah dan membuka peluang untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik dan fasilitas infrastruktur di daerah tersebut. Untuk menjaga agar pencapaian ini berkelanjutan, pemerintah daerah perlu terus memperbaiki sistem manajemen perparkiran dan melakukan inovasi dalam menghadapi dinamika perkembangan sektor transportasi dan mobilitas masyarakat.

2. Belanja Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran munir sebesar Rp. 32.785.428.306 kemudia pada tanggal 30 Agustus 2024 mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 33.055.590.400 yang mempunyai rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 31.054.290.400 dan Belaja Modal sebesar Rp. 2.001.300.000. berikut ini adalah tabel capaian anggaran program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2024:

Tabel 3.19.
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capian (%)	
					Keuangan	Fisik
	Dinas Perhubungan - Kabupaten Demak		33.055.590.400	32.494.709.111	98,30	100,00
I.	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		29.126.590.400	28.637.701.984	98,32	100,00
	A.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.550.000	26.840.000	97,42	100,00
	1.	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	27.550.000	26.840.000	97,42	100,00



No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capian (%)	
					Keuangan	Fisik
	B.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.441.175.400	6.163.296.329	95,69	100,00
	1.	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.827.734.600	3.661.064.405	95,65	100,00
	2.	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.613.440.800	2.502.231.924	95,74	100,00
	C.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	123.560.000	120.290.000	97,35	100,00
	1.	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	122.450.000	119.290.000	97,42	100,00
	2.	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.110.000	1.000.000	90,09	100,00
	D.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.141.841	233.560.807	96,86	100,00
	1.	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.871.900	98,72	100,00
	2.	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.564.000	69.480.750	97,09	100,00
	3.	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.137.000	15.991.000	93,31	100,00
	4.	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	18.705.700	93,53	100,00
	5.	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000	17.149.500	85,75	100,00
	6.	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.440.841	102.361.957	99,92	100,00
	E.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.300.000	32.495.000	92,05	100,00
	1.	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	35.300.000	32.495.000	92,05	100,00
	F.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.981.969.159	21.806.110.998	99,20	100,00
	1.	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00
	2.	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.978.469.159	21.802.610.998	99,20	100,00
	G.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.894.000	255.108.850	92,47	100,00
	1.	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.894.000	148.441.683	89,48	100,00
	2.	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	70.000.000	67.138.500	95,91	100,00
	3.	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	14.775.000	98,50	100,00
	4.	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	24.753.667	99,01	100,00
II.	Program : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		3.929.000.000	3.857.007.127	98,17	100,00



No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capian (%)	
					Keuangan	Fisik
	A.	Kegiatan : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
	1.	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
	B.	Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.773.262.000	2.735.201.095	98,63	100,00
	1.	Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.683.262.000	2.645.651.095	98,60	100,00
	2.	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	90.000.000	89.550.000	99,50	100,00
	C.	Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	50.000.000	45.654.500	91,31	100,00
	1.	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50.000.000	45.654.500	91,31	100,00
	D.	Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	170.000.000	169.528.560	99,72	100,00
	1.	Sub Kegiatan : Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	20.000.000	19.835.000	99,18	100,00
	2.	Sub Kegiatan : Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00
	3.	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	110.000.000	109.693.560	99,72	100,00
	E.	Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	510.000.000	484.643.000	95,03	100,00
	1.	Sub Kegiatan : Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	350.000.000	333.485.500	95,28	100,00
	2.	Sub Kegiatan : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	160.000.000	151.157.500	94,47	100,00
	F.	Kegiatan : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	5.000.000	4.890.000	97,80	100,00
	1.	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5.000.000	4.890.000	97,80	100,00
	G.	Kegiatan : Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	343.038.000	341.436.472	99,53	100,00
	1.	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	75.000.000	74.318.472	99,09	100,00
	2.	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	268.038.000	267.118.000	99,66	100,00
	H.	Kegiatan : Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	67.700.000	65.653.500	96,98	100,00

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capian (%)	
					Keuangan	Fisik
		Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	1.	Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.700.000	40.835.000	95,63	100,00
	2.	Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	24.818.500	99,27	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

mendapatkan anggaran munir sebesar Rp. 32.785.428.306 kemudia pada tanggal 30 Agustus 2024 mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 33.055.590.400 yang mempunyai rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 31.054.290.400 dan Belaja Modal sebesar Rp. 2.001.300.000. peningkatan anggaran tersebut digunakan sebagai Biaya Bagi Hasil Juru Parkir. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak pada Tahun Anggaran 2024, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 33.055.590.400 dan terrealisasi sebesar Rp. 32.494.709.111 (98,30%).



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Demak 2022 – 2026 melalui penetapan Visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi dan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Demak pada periode Tahun 2022 – 2026 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya masyarakat Demak yang sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh “Isu Strategis” sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di masa mendatang. Isu Strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Demak serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang perhubungan kepada masyarakat.

Dengan mempertimbangkan uraian dan beberapa data diatas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil dikarenakan semua target sasaran yang telah ditetapkan tercapai dengan Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mempunyai 2 (dua) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran dengan uraian keberhasilan sebagai berikut:

Tujuan Pertama: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan sasaran sebagai berikut:

- a) Sasaran 1: Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mempunyai realisasi 79,56 dari target 79,00 dengan hasil persentase capaian mencapai 100,70 dan masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sesuai skala pengukuran Kinerja Laporan Instansi Pemerintah “Sangat Tinggi”. Berdasarkan Nilai SAKIP diatas realisasi menggunakan Nilai SAKIP terakhir tahun 2023 yang di keluarkan Inspektorat Daerah.
- b) Sasaran 2: Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap perangkat daerah indikator Persentase Indikator Kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target capaiannya 100% dengan capaian dengan realisasi 100% dari Target 100%. dan masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sesuai skala pengukuran Kinerja Laporan Instansi Pemerintah “Sangat Tinggi”.

Tujuan Kedua: Meningkatkan Pelayanan Jaringan Transportasi dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi, dengan sasaran sebagai berikut:

- a) Sasaran 1: Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif Indikator Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti yang mempunyai target capaiannya 100% dengan capaian realisasinya 100% dari Target 100%. Berdasarkan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sesuai skala pengukuran Kinerja Laporan Instansi Pemerintah pada sasaran ini mempunyai kategori “Sangat Tinggi”.
 - b) Sasaran 2: Meningkatkan Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dengan indikator Kinerja Lalu Lintas Kabupaten yang mempunyai target capaiannya 0,41 dengan capaian realisasinya sebesar 0,30 dan capaian sebesar 115,56%. Berdasarkan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sesuai skala pengukuran Kinerja Laporan Instansi Pemerintah pada sasaran ini mempunyai kategori “Sangat Tinggi”.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Demak telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dengan menggunakan anggaran kurang dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 32.494.709.111 atau 98,30% dari total anggaran sebesar Rp. 33.055.590.400 namun realisasi fisik tercapai 100%. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat efisiensi anggaran dengan total Rp. 560.881.289 atau mencapai persentase sebesar 1,73%. Anggaran yang digunakan tersebut digunakan sebagai pendanaan pelaksanaan 2 Program, 15 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan.
 3. Dinas Kabupaten Demak mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana target awal 2.081.026.800 dan diperubahan mengalami peningkatan sebesar 3.216.875.000 Alokasi Total Anggaran Retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sebesar Rp. 3.216.875.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.413.430.000 (106,11%). Berkaitan dengan hal tersebut, retribusi dibagi menjadi 2 (dua) jenis pendapatan diantaranya Retribusi Jasa Umum yang mempunyai rata – rata presentase 99,47% dan Retribusi Jasa Usaha mempunyai presentase 107,63% dengan total jumlah antara kedua retribusi tersebut sebesar Rp. 196.555.000 atau presentase sebesar 106,11%.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan capaian kinerja yang telah diraih oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah menunjukkan hasil yang sangat baik dan signifikan. Untuk menjaga keberhasilan tersebut sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan ke depan, maka diperlukan rencana tindak lanjut yang terarah dan berkelanjutan. Rencana tindak lanjut ini akan difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu penguatan kelembagaan dan SDM, optimalisasi pelayanan publik, efisiensi anggaran, serta peningkatan pendapatan daerah. Berikut ini point penting dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja:



1. Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, Dinas Perhubungan perlu terus melakukan pengembangan kapasitas internal melalui pelatihan, peningkatan kompetensi, dan pemberian insentif berbasis kinerja. Hal ini bertujuan agar seluruh aparatur memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tugas pokok dan fungsi mereka, serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pelayanan publik yang terus berkembang. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan sistem manajemen kinerja secara berkala agar akuntabilitas dan transparansi kinerja tetap terjaga dengan baik.
2. Peningkatan pelayanan publik, upaya strategis yang perlu dilakukan antara lain adalah memperkuat sistem pengelolaan pengaduan masyarakat, memastikan setiap keluhan ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan transparan. Penggunaan teknologi informasi juga harus ditingkatkan, misalnya dengan penyediaan layanan berbasis digital untuk pelaporan, pengaduan, dan pemantauan layanan transportasi, sehingga masyarakat merasa lebih terlayani dan memiliki akses yang mudah terhadap informasi publik. Selain itu, perlunya survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk mendapatkan umpan balik yang objektif demi perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.
3. Berkaitan dengan efisiensi anggaran, meskipun saat ini realisasi penggunaan anggaran telah mencapai efisiensi sebesar 1,73% dari total anggaran, langkah ke depan adalah merancang sistem penganggaran berbasis kinerja yang lebih ketat, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome based budgeting). Dinas Perhubungan harus mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan prioritas dan menyesuaikannya dengan alokasi anggaran yang optimal agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD), keberhasilan realisasi melebihi target sebesar 106,11% merupakan hal yang sangat positif. Namun, agar capaian ini tidak bersifat temporer, perlu adanya strategi peningkatan dan diversifikasi sumber pendapatan. Dinas Perhubungan harus melakukan identifikasi potensi baru retribusi, meningkatkan kualitas layanan jasa yang menjadi sumber PAD, serta menertibkan sistem pemungutan agar lebih transparan dan akuntabel. Optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah yang dikelola Dinas Perhubungan juga dapat menjadi alternatif untuk menambah pemasukan.

Menunjuk point diatas lebih lanjutnya guna menjaga kesinambungan dari seluruh pencapaian ini, diperlukan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Setiap program dan kegiatan Dinas Perhubungan harus senantiasa sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2024, khususnya dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan. Selain itu, Dinas Perhubungan juga perlu menjalin



koordinasi lintas sektor, baik dengan OPD lain, instansi vertikal, maupun mitra swasta, guna memperkuat sinergi dan efektivitas program kerja.

Sebagai bentuk konkret dari tindak lanjut tersebut, maka Dinas Perhubungan dapat menyusun Rencana Aksi Tahunan yang memuat langkah-langkah strategis, indikator keberhasilan, jadwal pelaksanaan, dan pihak-pihak terkait. Dengan demikian, setiap kegiatan dapat dievaluasi secara sistematis dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

4.3. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2022–2026 memiliki peran strategis sebagai alat kendali manajerial yang digunakan oleh Kepala Dinas dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan arah, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan. Melalui laporan ini, dinas memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja kelembagaan, baik dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi penggunaan anggaran, pencapaian indikator kinerja, hingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang diberikan. Oleh karena itu, laporan kinerja bukan hanya sekadar bentuk pertanggungjawaban administratif kepada pemerintah daerah dan masyarakat, melainkan juga menjadi sumber data dan informasi penting untuk melakukan refleksi atas pencapaian maupun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.

Dalam konteks perencanaan pembangunan sektor transportasi di Kabupaten Demak, laporan kinerja ini dimanfaatkan secara aktif oleh Kepala Dinas sebagai feedback loop untuk meningkatkan kualitas perencanaan pada periode selanjutnya. Sebagai contoh, capaian nilai SAKIP sebesar 79,56 yang masuk dalam kategori "Sangat Tinggi", serta realisasi indikator strategis yang mencapai 100%, menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas kinerja telah dikelola dengan baik. Namun demikian, angka-angka tersebut tidak hanya dilihat sebagai bentuk pencapaian, melainkan juga sebagai bahan evaluasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan yang bisa direplikasi, serta area mana yang perlu diperkuat agar capaian kinerja tetap konsisten atau bahkan meningkat.

Pemanfaatan laporan ini juga memungkinkan Kepala Dinas untuk melihat lebih dalam efektivitas pola pelayanan publik di bidang transportasi. Sebagai contoh, keluhan masyarakat yang seluruhnya dapat ditindaklanjuti hingga 100% menjadi cerminan dari sistem layanan pengaduan yang berjalan optimal. Namun dari sisi manajerial, hal ini juga menjadi landasan untuk merancang strategi peningkatan kapasitas petugas pelayanan agar mampu memberikan respon yang lebih cepat, transparan, dan solutif. Laporan ini juga membantu mengidentifikasi sektor pelayanan

mana yang paling banyak mendapat perhatian publik, sehingga perencanaan program di tahun berikutnya dapat difokuskan pada sektor-sektor prioritas sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Dari aspek pengelolaan anggaran, efisiensi sebesar Rp. 560.881.289 dari total anggaran yang tersedia tanpa mengurangi capaian realisasi fisik (100%) memberikan bukti bahwa perencanaan anggaran sudah dilakukan dengan cermat. Namun, dinas juga dapat memanfaatkan data ini untuk menyusun perencanaan anggaran yang lebih realistis dan adaptif ke depan, termasuk menyusun strategi pemanfaatan sisa efisiensi anggaran secara lebih produktif, misalnya untuk mendukung inovasi pelayanan transportasi atau pelatihan SDM.

Selanjutnya, dari sisi pendapatan daerah, capaian PAD sebesar 106,11% dari target yang ditetapkan menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan kontribusi sektor transportasi terhadap pendapatan asli daerah. Informasi ini menjadi masukan penting bagi Kepala Dinas dalam merancang strategi optimalisasi potensi retribusi, baik melalui digitalisasi sistem pembayaran, peningkatan mutu pelayanan jasa usaha dan jasa umum, maupun penguatan kerja sama lintas sektor.

Secara keseluruhan, laporan kinerja menjadi salah satu alat utama bagi Kepala Dinas dalam mengarahkan dan menyusun perbaikan-perbaikan strategis secara berkelanjutan. Pemanfaatannya mencakup seluruh siklus manajemen kinerja, mulai dari tahap evaluasi hingga penyusunan rencana strategis berikutnya. Dengan menjadikan laporan ini sebagai sumber refleksi dan pengambilan keputusan yang berbasis data, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dapat terus menjaga konsistensi kinerjanya, meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, serta berkontribusi nyata dalam pencapaian visi Kabupaten Demak yang sejahtera dan berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan mendatang.

Demak, 29 Maret 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Demak

ARIEF SUDARYANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700518 199001 1 001

Tabel 3.6.
Hasil Analisis Responden Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

No .	Nama	Jenis Kelamin	Kisaran Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan									Keluhan/ Saran Perbaikan
							U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	suparjo	Laki - Laki	30 - 40 Tahun	SMA	WIRAUSAHA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Tidak Ada
2	MUSTOFA	Laki - Laki	30 - 40 Tahun	SMA	SWASTA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	4	4	3	4	3	3	4	4	4	Tidak Ada
3	lastri handayani	Perempuan	41 - 50 Tahun	SMA	SWASTA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	4	4	4	3	3	4	4	4	Tidak Ada
4	sinduu	Laki - Laki	41 - 50 Tahun	DIII - S1	SWASTA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	3	3	4	4	4	4	4	4	Tidak Ada
5	SUPARMAN	Laki - Laki	41 - 50 Tahun	SMA	SWASTA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	3	3	4	3	3	3	4	4	Tidak Ada
6	sumantri	Laki - Laki	30 - 40 Tahun	SMP	WIRAUSAHA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	4	4	4	4	3	4	4	4	4	Tidak Ada
7	Fajar	Laki - Laki	< 30 Tahun	DIII - S1	WIRAUSAHA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	4	3	4	3	4	4	4	4	Tidak Ada

No .	Nama	Jenis Kelamin	Kisaran Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan									Keluhan/ Saran Perbaikan
							U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	andik	Laki - Laki	30 - 40 Tahun	SMP	SWASTA	Pelayanan Perparkiran	3	3	4	4	3	4	4	3	3	Tidak Ada
9	Munawar	Laki - Laki	41 - 50 Tahun	SMA	WIRAUSAHA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	3	3	4	3	3	3	4	4	Tidak Ada
10	budi handoyo	Laki - Laki	< 30 Tahun	SD	SWASTA	Pelayanan Perparkiran	4	4	4	4	3	3	3	4	4	Tidak Ada
11	Parman	Laki - Laki	41 - 50 Tahun	SMA	WIRAUSAHA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	3	3	4	3	4	4	4	3	Tidak Ada
12	Junaidi	Laki - Laki	30 - 40 Tahun	SMA	SWASTA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	3	3	4	4	3	4	4	4	Tidak Ada
13	suparti	Perempuan	30 - 40 Tahun	SMA	SWASTA	Pelayanan Penerangan Jalan Umum	3	3	3	4	4	4	4	4	4	Tidak Ada
14	Indah Nugrahaini	Perempuan	30 - 40 Tahun	SMA	SWASTA	Pelayanan Penerangan Jalan Umum	3	4	3	4	4	4	4	4	4	Tidak Ada
15	Harno	Laki - Laki	> 51 Tahun	DIII - S1	WIRAUSAHA	Pelayanan Penerangan Jalan Umum	3	4	4	4	4	3	3	4	3	Tidak Ada
16	Ragil joko	Laki - Laki	30 - 40 Tahun	SMA	SWASTA	Pelayanan Perparkiran	4	4	3	4	3	3	3	4	4	Tidak Ada

[illegible]

No .	Nama	Jenis Kelamin	Kisaran Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan									Keluhan/ Saran Perbaikan
							U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
26	Sujar	Laki - Laki	30 - 40 Tahun	SMA	SWASTA	Pelayanan Perparkiran	3	4	4	4	3	4	4	4	4	Tidak Ada
27	Ariatun	Perempuan	< 30 Tahun	DIII - S1	SWASTA	Pelayanan Pengaturan Lalu Lintas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tidak Ada
28	Muhammad Arif Hidayat	Laki - Laki	< 30 Tahun	SMA	SWASTA	Pelayanan Penerangan Jalan Umum	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Tidak Ada
29	Aan	Laki - Laki	30 - 40 Tahun	DIII - S1	WIRUSAHA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Tidak Ada
30	angga	Laki - Laki	< 30 Tahun	DIII - S1	PNS	Pelayanan Penerangan Jalan Umum	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Tidak Ada
31	Bahang nugroho	Laki - Laki	30 - 40 Tahun	SMA	WIRUSAHA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tidak Ada
32	Ahmad khoironi	Laki - Laki	< 30 Tahun	SMA	WIRUSAHA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Tidak Ada
33	Eko Irwanto	Laki - Laki	41 - 50 Tahun	SMP	SWASTA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	3	3	4	4	3	3	3	3	Tidak Ada

No .	Nama	Jenis Kelamin	Kisaran Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan									Keluhan/ Saran Perbaikan
							U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
34	Agus Haryanto	Laki - Laki	41 - 50 Tahun	DIII - S1	SWASTA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Tidak Ada
35	Agung farel	Laki - Laki	30 - 40 Tahun	SMA	SWASTA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Tidak Ada
36	Giyanto	Laki - Laki	41 - 50 Tahun	SMP	SWASTA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Tidak Ada
37	Mustadi	Laki - Laki	30 - 40 Tahun	SMA	SWASTA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	4	4	4	3	4	3	4	3	Tidak Ada
38	Arif priyono	Laki - Laki	30 - 40 Tahun	SMA	WIRUSAHA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Tidak Ada
39	Rudy Kurniawan	Laki - Laki	30 - 40 Tahun	SMA	SWASTA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tidak Ada
40	Ahmad shodikin	Laki - Laki	30 - 40 Tahun	SMP	SWASTA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Tidak Ada
41	Budi suryanto	Laki - Laki	30 - 40 Tahun	SMP	SWASTA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	4	4	4	3	3	4	4	3	Tidak Ada

[illegible]

[illegible]

No .	Nama	Jenis Kelamin	Kisaran Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan									Keluhan/ Saran Perbaikan	
							U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
59	Edo harum saputra	Laki - Laki	< 30 Tahun	SMA	SWASTA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	3	3	4	3	3	4	4	3	Tidak Ada	
60	Ahmad zarmuji	Laki - Laki	< 30 Tahun	SD	SWASTA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Tidak Ada	
61	Ahmed	Laki - Laki	41 - 50 Tahun	SMP	WIRAUSAHA	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tidak Ada	
Σ Nilai/ Unsur							203	216	208	244	210	215	218	236	220		
NNR/ Unsur							3,328	3,541	3,410	4,000	3,443	3,525	3,574	3,869	3,607		
NRR/ Terbilang/Unsur							0,366	0,390	0,375	0,440	0,379	0,388	0,393	0,426	0,397	*)	3,552
IKM Unit Pelayanan																**)	88,81

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, 2024

Keterangan:

- U1 s/d U9 : Unsur - Unsur Pelayanan
- NRR : Nilai Rata - Rata
- IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) : Jumlah NRR IKM Terbilang
- **) : Jumlah NRR Terbilang x 25
- NRR Per Unsur : Jumlah Nilai Per Unsur dibagi Jumlah Kuesioner yang terisi
- NRR Terbilang : NRR Per Unsur x 0,11
- Per Unsur

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata - Rata
U1	Persyaratan Pelayanan	3,328
U2	Prosedur Pelayanan	3,541
U3	Waktu Pelayanan	3,410
U4	Biaya/ Tarif Pelayanan	4,000
U5	Produk Pelayanan	3,443
U6	Kompetensi Petugas Pelayanan	3,525
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,574
U8	Penanganan Pengaduan Layanan	3,869
U9	Sarana dan Prasarana	3,607

Mutu Pelayanan:

- A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B (Baik) : 76,61 - 88,30
- C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

Melihat tabel diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak telah malekasanakan Survey Kepuasan Masyarakat dibidang pelayanan perhubung dengan target pada tahun 2024 sebesar 91,60 dengan hasil jumlah responden 61 (enam satu) orang dengan hasil mutu pelayanan sebesar 88,81%. Berdasarkan definisi operasional dimana hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas sasaran strategis yang mencapai target guna mengevaluasi seberapa besar kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks SKM} = \frac{\text{IKM Unit Pelayanan}}{\text{Target IKM Unit Pelayanan}} \times 100$$

$$\text{Indeks SKM} = \frac{88,81}{91,60} \times 100$$

$$\text{Indeks SKM} = 96,95$$

Berdasarkan perhitungan dan analisis Indeks Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan Google Form kepada penerima pelayanan bidang perhubungan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 96,95 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik).